



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerinb tahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Pada dasarnya LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2018.

LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2018);
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD;

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah;
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu;

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan LRA;
 - 5.1.2 Belanja;
 - 5.1.3 Transfer;
 - 5.1.4 Pembiayaan;
- 5.2 Laporan Perubahan SAL
 - 5.2.1 Perubahan SAL
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset;
 - 5.3.2 Kewajiban;
 - 5.3.3 Ekuitas;
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan LO;
 - 5.4.2 Beban;
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional;
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa;



- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Perubahan Ekuitas;

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Data-data yang diperoleh dari buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2018, Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 231.519 jiwa yang terdiri atas 117.030 jiwa penduduk laki-laki dan 114.489 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Tana Toraja mengalami pertumbuhan sebesar 0,57%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja tahun 2017 mencapai 112,7 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 19 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makale dengan kepadatan sebesar 891,62 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Simbuang sebesar 32,99 jiwa/km².

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Toraja memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD juga disusun dengan mengacu pada RPJP Kabupaten Tana Toraja, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals (MDGs)*. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja setiap tahun.

Dalam Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal serta tabungan dan investasi.



Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan semakin rendah. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan kebijakan umum bidang keuangan daerah sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya sektor usaha swasta dalam semua ukuran, baik menengah maupun kecil yang akan berfungsi sebagai subyek pajak dan retribusi baru;
2. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dengan cara:
 - a. Mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk setiap bidang pemerintahan yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui forum Musrenbang Propinsi dan Nasional,
 - b. Mendorong pimpinan OPD untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Teknis di tingkat pusat,
 - c. Menjalinkan hubungan kerja dan komunikasi yang intensif dengan para pelaku ekonomi daerah dan nasional untuk melakukan investasi di Kabupaten Tana Toraja,
 - d. Menerbitkan profil investasi pada berbagai sektor potensial untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
3. Memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang terkait untuk penanaman modal di Kabupaten Tana Toraja,
4. Penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian visi dan misi daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan melalui upaya pemutakhiran data sumber-sumber pendapatan daerah,
2. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD agar menghasilkan penerimaan,
3. Menciptakan kegiatan yang beorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru,



4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah,
5. Perbaikan dan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan publik,
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja disusun dengan pendekatan anggaran belanja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur APBD Kabupaten Tana Toraja dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dalam mewujudkan visi dan misi daerah yang dianggarkan pada belanja OPD.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja sepanjang periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat. Ini harus diwujudkan melalui penyehatan ratio alokasi antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung terutama untuk menyehatkan ratio antara gaji dan upah dengan belanja barang, jasa dan modal. Besaran belanja honor dan upah bagi tiap-tiap OPD diupayakan agar berada dalam keseimbangan yang rasional dengan belanja modal, barang dan jasa serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran,
3. Memberikan prioritas yang lebih tinggi bagi program yang menunjang upaya pencapaian visi misi daerah.



2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengatasi permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh OPD wajib menyusun rencana pagu kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada Standar Analisa Belanja dan Harga Satuan Setempat,
2. Penggunaan SILPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada OPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur, bukan untuk penambahan belanja tidak langsung.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Target Kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 adalah target yang ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatannya dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.

Secara umum target APBD Kabupaten Tana Toraja tercapai sesuai target yang ditetapkan. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.197.884.772.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.071.079.856.692,94 atau 89,41%. Tercapainya pendapatan ini merupakan kontribusi pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan target sebesar Rp1.013.184.772.000,00 dengan realisasi sebesar Rp964.971.414.074,00 atau 95%. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp184.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp106.108.442.618,94 atau 57,45%.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan sebesar Rp1.266.096.910.815,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp184.700.000,00. Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.013.184.772.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp68.212.138.815,00).

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja TA 2018**

(dalam rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
I. Pendapatan	1.197.884.772.000,00	1.071.079.856.692,94	89,41
I.1. Pendapatan Asli Daerah	184.700.000.000,00	106.108.442.618,94	57,45
I.2. Dana Transfer	705.129.367.000,00	695.143.547.384,00	98,58
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	308.055.405.000,00	269.827.866.690,00	87,59
II. Belanja	1.104.117.458.935,00	961.218.936.919,34	87,06
II.1. Belanja Operasi	769.750.447.774,00	710.316.892.845,87	92,28
II.2. Belanja Modal	332.863.819.518,00	249.599.106.961,82	74,99
II.3. Belanja Tidak Terduga	1.503.191.643,00	1.302.937.111,65	86,68
III. Transfer	161.979.451.880,00	161.236.441.354,00	99,54
III.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.007.500.000,00	264.588.474,00	26,26
III.2. Transfer Bantuan Keuangan	160.971.951.880,00	160.971.852.880,00	100,00
Surplus/(Defisit)	(68.212.138.815,00)	(51.375.521.580,40)	75,32
III. Pembiayaan	78.212.138.815,00	78.212.138.814,76	100,00
III.1. Penerimaan	73.212.138.815,00	73.212.138.814,76	100,00
III.2. Pengeluaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	68.212.138.815,00	68.212.138.814,76	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebelum Koreksi		16.836.617.234,36	100,00
Koreksi SiLPA	0,00	(416.449.982,30)	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	16.420.167.252,06	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, secara umum realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.071.079.856.692,94 atau 89,41% belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.197.884.772.000,00. Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp695.143.547.384,00 dari target anggaran sebesar Rp705.129.367.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, dari sisi realisasi mengalami penurunan sebesar Rp41.892.650.272,00. Pada tahun anggaran 2018 dari sisi realisasi penerimaan dana perimbangan mencapai 98,86% dari target yang ditetapkan.



Untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp269.827.866.690,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

1. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada Tahun Anggaran 2018 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.104.117.458.935,00 dan direalisasikan sebesar Rp961.218.936.919,34 atau 87,06% sehingga masih terdapat efisiensi belanja sebesar Rp142.898.522.015,66. Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp769.750.447.774,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp710.316.892.845,87,00 atau sebesar 92,28%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasional ini terdiri atas :

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Operasional

(dalam rupiah)

No	Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	438.771.468.940,00	437.970.168.441,00	99,82
2	Belanja Barang	285.608.081.234,00	235.440.034.374,87	82,43
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
4	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	42.742.897.600,00	36.888.690.030,00	86,30
6	Belanja Bantuan Sosial	128.000.000,00	18.000.000,00	14,06
	Jumlah	769.750.447.774,00	710.316.892.845,87	92,28

Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp548.999.816.463,00 dan terealisasi sebesar Rp553.827.558.230,65 atau 100,88% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Tidak Langsung	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	371.233.672.940,00	381.568.879.765,00	102,78
2	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah	11.655.500.000,00	9.701.300.000,00	83,23
4	Belanja Bantuan Sosial	128.000.000,00	18.000.000,00	14,06
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.007.500.000,00	264.588.474,00	26,26
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	160.971.951.880,00	160.971.852.880,00	100,00
7	Belanja Tidak Terduga	1.503.191.643,00	1.302.937.111,65	86,68
	Jumlah	548.999.816.463,00	553.827.558.230,65	100,88

Belanja Langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada Tahun Anggaran 2018, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp717.097.094.352,00 dan terealisasi sebesar Rp568.627.820.042,69 atau 79,30% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	73.739.969.000,00	60.090.413.676,00	81,49
2	Belanja Barang dan Jasa	310.493.305.834,00	258.938.299.404,87	83,40
3	Belanja Modal	332.863.819.518,00	249.599.106.961,82	74,99
	Jumlah	717.097.094.352,00	568.627.820.042,69	79,30



Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp73.212.138.815,00 dapat direalisasikan sebesar Rp73.212.138.814,76 atau 100%. Sedangkan target Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 100%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu :

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Tana Toraja (baik pajak maupun retribusi daerah).
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja.
4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
2. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/badan/kantor dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari OPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :



1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah.
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan- LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode yang digunakan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya.

c. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga



(PFK), Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

9. Penyisihan Dana Bergulir

- a. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas Dana Bergulir didasarkan pada kondisi masing-masing dana bergulir pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

10. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- b. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
- 1) Tanah
 - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa (nilai residu).
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2017.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2018. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2018 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018.

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing di bandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp1.266.096.910.815,00 dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp1.122.455.378.273,34 pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018. Dasar penganggaran dan realisasi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.197.884.772.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.071.079.856.692,94 atau mencapai 89,41% dari anggaran.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2018 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.



Belanja Daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tak Terduga, dan (iv) Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Anggaran Belanja dan Transfer Daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.266.096.910.815,00 realisasi sebesar Rp1.122.455.378.273,34 atau 88,65%, yang terdiri dari (i) Operasi sebesar Rp710.316.892.845,87 (ii) Belanja Modal sebesar Rp249.599.106.961,82 (iii) Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.302.937.111,65 dan (iv) Transfer sebesar Rp161.236.441.354,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka Surplus Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar (Rp51.375.521.580,40).

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp73.212.138.814,76 yang seluruhnya merupakan Penerimaan Daerah berupa SiLPA awal tahun sebesar Rp73.212.138.814,76 dan koreksi lebih catat SiLPA sebesar Rp16.449.982,30 (kas di bendahara penerimaan BLUD). Realisasi Pengeluaran Daerah untuk penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00. Berdasarkan Surplus Anggaran dan Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp16.420.167.252,06.

1. Pendapatan	2018	2017
	Rp1.071.079.856.692,94	Rp1.095.027.645.917,93

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.197.884.772.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.071.079.856.692,94 atau mencapai 89,41% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rincian Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2018		%	(dalam rupiah)
		Anggaran	Realisasi		Tahun 2017
					Realisasi
	PENDAPATAN	1.197.884.772.000,00	1.071.079.856.692,94	89,41	1.095.027.645.917,93
A.	Pendapatan Asli Daerah	184.700.000.000,00	106.108.442.618,94	57,45	140.418.241.234,93
1)	Pendapatan Pajak Daerah	15.750.000.000,00	9.288.335.677,00	58,97	9.211.461.706,70
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	18.250.000.000,00	10.418.281.371,00	57,09	8.146.401.492,00
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.500.000.000,00	6.084.937.047,00	52,91	5.782.413.940,16
4)	Lain-lain PAD yang Sah	139.200.000.000,00	80.316.888.523,94	57,70	117.277.964.096,07
B.	Pendapatan Transfer	705.129.367.000,00	695.143.547.384,00	98,58	737.036.197.656,00
a.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	702.129.367.000,00	694.143.547.384,00	98,86	730.440.592.056,00
1)	Dana Bagi Hasil Pajak	11.921.970.000,00	9.274.052.897,00	77,79	13.245.367.156,00
2)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.784.826.000,00	4.407.101.559,00	92,11	3.623.881.247,00
3)	Dana Alokasi Umum (DAU)	551.496.571.000,00	551.496.571.000,00	100,00	550.123.359.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	133.926.000.000,00	128.965.821.928,00	96,30	163.447.984.653,00
b.	Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Lainnya	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	33,33	6.595.605.600,00
1)	Bantuan Keuangan	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	33,33	6.595.605.600,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
C.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	308.055.405.000,00	269.827.866.690,00	87,59	217.573.207.027,00
1)	Pendapatan Hibah	60.232.625.000,00	35.932.198.162,00	59,66	1.360.819.000,00
2)	Pendapatan Lainnya	44.000.000.000,00	35.667.901.211,00	81,06	36.507.191.890,00
3)	Dana Penyesuaian	100.308.512.000,00	94.713.499.317,00	94,42	89.878.392.137,00
4)	Dana Lembang	103.514.268.000,00	103.514.268.000,00	100,00	89.826.804.000,00

Rincian pendapatan per kode rekening dapat dilihat pada Lampiran 1.

a. Pendapatan Asli Daerah	2018	2017
	Rp106.108.442.618,94	Rp140.418.241.234,93

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp106.108.442.618,94 dan Rp140.418.241.234,93. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp184.700.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp106.108.442.618,94 atau sebesar 57,45%. Terdapat kenaikan dan penurunan atas pendapatan asli daerah sebesar (Rp34.309.798.615,99) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		Kenaikan/ Penurunan	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	15.750.000.000,00	9.288.335.677,00	76.873.970,30	9.211.461.706,70
2	Pendapatan Retribusi	18.250.000.000,00	10.418.281.371,00	2.271.879.879,00	8.146.401.492,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.500.000.000,00	6.084.937.047,00	302.523.106,84	5.782.413.940,16
4	Lain-lain PAD yang Sah	139.200.000.000,00	80.316.888.523,94	(36.961.075.572,13)	117.277.964.096,07
	Jumlah	184.700.000.000,00	106.108.442.618,94	(34.309.798.615,99)	140.418.241.234,93

1) Pendapatan Pajak Daerah	2018	2017
	Rp9.288.335.677,00	Rp9.211.461.706,70

Pendapatan Pajak Daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Wajib Pajak dalam Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp9.288.335.677,00. Rincian pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pajak Hotel	435.000.000,00	371.938.806,00	85,50	319.521.925,00
2	Pajak Restoran	625.000.000,00	382.519.130,00	61,20	324.197.436,00
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	2.300.000,00	11,50	638.000,00
4	Pajak Reklame	3.123.000.000,00	571.323.907,00	18,29	200.780.200,00
5	Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000,00	4.457.315.091,00	89,15	3.912.200.431,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.522.000.000,00	918.370.215,00	26,08	1.581.306.788,70
7	PBB - P2	2.525.000.000,00	2.026.944.926,00	80,28	2.050.227.658,00
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000,00	557.623.602,00	111,52	822.589.268,00
	Jumlah	15.750.000.000,00	9.288.335.677,00	58,97	9.211.461.706,70



2) **Pendapatan** 2018
Retribusi Daerah Rp10.418.281.371,00 2017
Rp8.146.401.492,00

Retribusi Daerah adalah Penerimaan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Wajib Retribusi dalam Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp10.418.281.371,00. Rincian retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	766.375.100,00	153,28	388.118.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	150.000.000,00	119.095.000,00	79,40	110.045.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	445.425.000,00	74,24	452.804.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.380.650.000,00	813.438.400,00	58,92	1.094.862.925,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	98.857.500,00	65,91	107.394.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00	11.500.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	240.000.000,00	130.547.840,00	54,39	
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	752.550.000,00	563.675.000,00	74,90	229.604.000,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	800.000.000,00	354.250.000,00	44,28	352.360.000,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	213.000.000,00	213,00	152.800.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	4.767.450.000,00	2.625.660.000,00	55,07	2.864.290.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.865.350.000,00	3.501.077.800,00	44,51	1.672.718.811,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	6.300.000,00	12,60	9.240.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	550.000.000,00	686.435.231,00	124,81	518.009.200,00
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	10.000.000,00	450.000,00	4,50	450.000,00
16	Retribusi Izin Gangguan	170.000.000,00	25.149.500,00	14,79	125.940.056,00
17	Retribusi Izin Trayek	105.000.000,00	56.465.000,00	53,78	56.265.000,00
18	Tunggakan Retribusi Pasar	9.000.000,00	9.080.000,00	100,89	
Jumlah		18.250.000.000,00	10.418.281.371,00	57,09	8.146.401.492,00

3) **Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** 2018
Rp6.084.937.047,00 2017
Rp5.782.413.940,16

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari bagian laba (deviden) atas modal yang ditanamkan atau disertakan pada PT. Bank Sulselbar dalam Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa Nomor 3 tanggal 09 Pebruari 2018 dan Akta RUPS Tahunan Nomor 2 tanggal 09 Pebruari 2018, bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sejumlah Rp6.084.937.047,00 atas kepemilikan saham secara proposional sebesar 1,88%.



4) Lain lain	2018	2017
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	Rp80.316.888.523,94	Rp117.277.964.096,07

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2018, jumlah Lain-lain PAD yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sebesar Rp80.316.888.523,94 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5 Rincian Lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3.053.150.000,00	82.270.000,00	2,69	229.316.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	46.240.000,00		15.500.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro	9.900.000.000,00	3.515.351.212,94	35,51	3.503.555.105,26
4	Pendapatan Bunga	28.032.123.600,00	2.047.767.183,00	7,31	4.471.713.797,45
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.000.000.000,00	5.110.823.295,41	255,54	2.575.640.289,73
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	59.583.491,50		647.663.912,35
7	Pendapatan Denda Pajak	1.500.000,00	7.737.468,00	515,83	10.771.832,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00		1.376.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	125.262.095,00		592.893.356,00
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	96.213.226.400,00	69.321.853.778,09	72,05	67.517.570.296,28
11	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)				37.711.963.507,00
		139.200.000.000,00	80.316.888.523,94	57,70	117.277.964.096,07

b. Pendapatan Transfer	2018	2017
	Rp695.143.547.384,00	Rp737.036.197.656,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 sebesar Rp695.143.547.384,00 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Transfer tahun 2018 sebesar Rp705.129.367.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp695.143.547.384,00 atau sebesar 98,58% yang terdiri dari :

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		Bertambah/ Berkurang	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	2018	Realisasi
1	Dana Bagi Hasil Pajak	11.921.970.000,00	9.274.052.897,00	(3.971.314.259,00)	13.245.367.156,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4.784.826.000,00	4.407.101.559,00	783.220.312,00	3.623.881.247,00
3	Dana Alokasi Umum	551.496.571.000,00	551.496.571.000,00	1.373.212.000,00	550.123.359.000,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2018		Bertambah/ Berkurang	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi	2018	Realisasi
4	Dana Alokasi Khusus	133.926.000.000,00	128.965.821.928,00	(34.482.162.725,00)	163.447.984.653,00
5	Bantuan Keuangan	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(5.595.605.600,00)	6.595.605.600,00
	Jumlah	705.129.367.000,00	695.143.547.384,00	(41.892.650.272,00)	737.036.197.656,00

1) Dana Bagi Hasil Pajak

	2018	2017
	Rp9.274.052.897,00	Rp13.245.367.156,00

Bagi Hasil Pajak merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2018, jumlah bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sejumlah Rp9.274.052.897,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.7 Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.042.059.000,00	4.775.414.038,00	94,71	4.914.868.971,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	6.879.911.000,00	4.498.638.859,00	65,39	8.096.108.129,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau				234.390.056,00
	Jumlah	11.921.970.000,00	9.274.052.897,00	77,79	13.245.367.156,00

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

	2018	2017
	Rp4.407.101.559,00	Rp3.623.881.247,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2018, jumlah bagi hasil bukan pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sejumlah Rp4.407.101.559,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak – Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	15.623.000,00	33.994.904,00	217,60	23.703.718,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)		56.418.304,00		
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)		2.752.536.010,00		1.937.788.081,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan -	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	525.572.127,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi		74.650,00		1.136.817.321,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.232.656.000,00	862.843.100,00	70,00	
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batuan	2.593.520.000,00	0,00		
Jumlah		4.784.826.000,00	4.407.101.559,00	92,11	3.623.881.247,00

3) Dana	2018	2017
Alokasi Umum	Rp551.496.571.000,00	Rp550.123.359.000,00

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima Dana Alokasi Umum sejumlah Rp551.496.571.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dana Alokasi Umum bertambah sebesar Rp1.373.212.000,00 pada tahun 2018.

4) Dana Alokasi Khusus	2018	2017
	Rp128.965.821.928,00	Rp163.447.984.653,00

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk membiayai kebutuhan khusus (*specific grant*). Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp128.965.821.928,00 atau sebesar 96,30% dari yang dianggarkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9 Rincian Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	69.775.000.000,00	69.260.853.700,00	99,26	26.291.553.100,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi	1.250.000.000,00	3.266.312.000,00	261,30	
3	DAK Bidang Kesehatan	24.586.000.000,00	21.788.099.178,00	88,62	14.571.940.230,00
4	DAK Bidang Perdagangan				2.835.316.000,00
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.158.000.000,00	1.112.001.000,00	96,03	
6	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.112.000.000,00	1.058.350.000,00	95,18	
7	DAK Bidang Pertanian	4.520.000.000,00	4.504.838.000,00	99,66	6.370.890.000,00
8	DAK Bidang Pendidikan	13.231.000.000,00	12.913.247.550,00	97,60	11.537.000.000,00
9	DAK Bidang Kedaulatan Pangan				7.020.534.500,00
10	DAK Bidang IPD				94.820.750.823,00
11	DAK Bidang Irigasi	5.921.000.000,00	5.194.396.000,00	87,73	
12	DAK Bidang Pariwisata	1.649.000.000,00	1.647.500.000,00	99,91	
13	DAK Bidang Prasarana PEMDA	2.085.000.000,00	0,00	0,00	
14	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.703.000.000,00	2.703.023.000,00	100,00	
15	DAK Bidang Pasar	3.936.000.000,00	3.674.906.500,00	93,37	
16	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	2.000.000.000,00	1.842.295.000,00	92,11	
Jumlah		133.926.000.000,00	128.965.821.928,00	96,30	163.447.984.653,00



Pada tahun 2017 terdapat sisa dana DAK sebesar Rp23.489.778.767,09 yang terdiri dari sisa dana DAK tahun 2016 sebesar Rp10.427.695.668,00 dan tahun 2017 sebesar Rp13.062.083.099,00. Sisa dana DAK tersebut digunakan untuk pembayaran utang DAK dan pembayaran kegiatan DAK di tahun 2018. Namun pada 31 Desember 2018 terdapat sisa DAK sebesar Rp35.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembayaran kegiatan DAU dan PAD. Hal tersebut dikarenakan terdapat penganggaran PAD yang terlalu tinggi dan penerimaan yang tidak mencapai target. Sehingga terdapat pemakaian dana DAK untuk kegiatan DAU. Sisa dana DAK yang digunakan untuk kegiatan DAU ini merupakan sisa dana DAK fisik dan DAK non fisik. Pada tahun 2019 dana DAK fisik dan DAK non fisik yang dipinjam di tahun 2018 telah di kembalikan ke rekening DAK sebesar Rp35.000.000.000,00, namun dana tersebut digunakan untuk membuka deposito pada tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

1) Bantuan Keuangan	2018	2017
	Rp1.000.000.000,00	Rp6.595.605.600,00

Bantuan Keuangan merupakan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi, dalam periode Tahun Anggaran 2018 terealisasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 33,33% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.10 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	33,33	6.595.605.600,00
Jumlah		3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	33,33	6.595.605.600,00

c. Pendapatan Lain-Lain yang Sah	2018	2017
	Rp269.827.866.690,00	Rp217.573.207.027,00

Pendapatan Lain-Lain yang Sah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 sebesar Rp269.827.866.690,00. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah tahun 2018 sebesar Rp308.055.405.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp269.827.866.690,00 atau sebesar 87,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Pendapatan Lain-lain yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		Kenaikan /penurunan	Taun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Hibah	60.232.625.000,00	35.932.198.162,00	34.571.379.162,00	1.360.819.000,00
2	Pedapatan Lainnya	44.000.000.000,00	35.667.901.211,00	(839.290.679,00)	36.507.191.890,00
3	Dana Penyesuaian	100.308.512.000,00	94.713.499.317,00	4.835.107.180,00	89.878.392.137,00
4	Dana Lembang	103.514.268.000,00	103.514.268.000,00	13.687.464.000,00	89.826.804.000,00
Total		308.055.405.000,00	269.827.866.690,00	52.254.659.663,00	217.573.207.027,00



1) Pendapatan Hibah	2018	2017
	Rp35.932.198.162,00	Rp1.360.819.000,00

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merealisasikan pendapatan hibah tahun 2018 sebesar Rp35.932.198.162,00 yang terdiri dari pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp720.000.000,00 dan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp35.212.198.162,00. Pendapatan BOS merupakan pendapatan yang ditransfer dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke sekolah dan di sahkan di BPKAD menggunakan SP2B dan SP3B.

2) Pendapatan Lainnya	2018	2017
	Rp35.667.901.211,00	Rp36.507.191.890,00

Pendapatan Lainnya merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diperoleh dari transfer Pemerintah Sulawesi Selatan. Pada Tahun Anggaran 2018 jumlah dana bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sejumlah Rp35.667.901.211,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12 Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.390.844.177,00	7.065.738.891,00	43,11	7.342.692.306,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.650.000.000,00	5.507.743.942,00	97,48	5.929.114.945,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.500.000.000,00	9.931.982.676,00	116,85	9.235.101.492,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	342.124.433,00	34,21	1.285.797.467,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	12.187.000.000,00	12.600.478.269,00	103,39	12.714.485.680,00
6	Bagi Hasil Bea Cukai dari Hasil Tembakau	272.155.823,00	219.833.000,00	80,77	
Jumlah		44.000.000.000,00	35.667.901.211,00	81,06	36.507.191.890,00

3) Dana Penyesuaian	2018	2017
	Rp94.713.499.317,00	Rp89.878.392.137,00

Dana Penyesuaian merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2018 terealisasi sejumlah Rp94.713.499.317,00 atau sebesar 94,42% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Dana Penyesuaian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.575.000.000,00	919.678.000,00	58,39	937.200.000,00
2	Tunjangan Profesi Guru	67.014.539.000,00	67.014.539.000,00	100,00	65.105.231.506,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.300.000.000,00	3.264.600.000,00	98,93	2.608.200.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	13.246.349.000,00	12.876.456.917,00	97,21	14.004.969.431,00
5	Akreditasi	1.870.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Tabel 5.15 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai	437.611.341.940,00	437.970.168.441,00	100,08	403.998.017.643,00
2	Belanja Barang dan Jasa	279.405.908.234,00	235.440.034.374,87	84,26	233.717.185.546,83
3	Belanja Bunga	0,00	0,00		11.243.509,15
4	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	0,00	0,00	3.124.000.000,00
5	Belanja Hibah	50.105.197.600,00	36.888.690.030,00	73,62	36.616.174.524,00
6	Belanja Bantuan Sosial	128.000.000,00	18.000.000,00	14,06	22.500.000,00
Jumlah		769.750.447.774,00	710.316.892.845,87	92,28	677.489.121.222,98

1) Belanja Pegawai	2018	2017
	<u>Rp437.970.168.441,00</u>	<u>Rp403.998.017.643,00</u>

Belanja Pegawai/Personalia merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2018 yang seluruhnya berjumlah Rp437.970.168.441,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.16 Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	Belanja Tidak Langsung:				
1	Gaji dan Tunjangan	279.615.707.331,00	291.580.171.555,00	104,28	281.156.939.843,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	88.149.965.609,00	86.739.775.147,00	98,40	86.338.442.170,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.868.000.000,00	2.861.700.000,00	99,78	2.692.008.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	300.000.000,00	164.817.149,00	54,94	300.000.000,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	300.000.000,00	222.415.914,00	74,14	299.664.314,00
Jumlah		371.233.672.940,00	381.568.879.765,00	102,78	370.787.054.327,00
	Belanja Langsung:				
6	Uang Lembur	1.394.270.000,00	1.125.756.000,00	80,74	880.439.000,00
7	Honorarium PNS	29.363.844.000,00	23.531.831.500,00	80,14	21.429.605.155,00
8	Honorarium Non PNS	2.617.110.000,00	2.065.720.000,00	78,93	7.591.175.000,00
9	Belanja Pegawai untuk BLUD	33.002.445.000,00	29.677.981.176,00	89,93	3.309.744.161,00
Jumlah		66.377.669.000,00	56.401.288.676,00	84,97	33.210.963.316,00
Jumlah Belanja Pegawai		437.611.341.940,00	437.970.168.441,00	100,08	403.998.017.643,00

2) Belanja Barang dan Jasa	2018	2017
	<u>Rp235.440.034.374,87</u>	<u>Rp233.717.185.546,83</u>

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2018 yang seluruhnya berjumlah Rp235.440.034.374,87 dengan rincian sebagai berikut :



4) Belanja Subsidi	2018	2017
	Rp0,00	Rp3.124.000.000,00

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat realisasi. Sebab, belanja subsidi direalisasikan menggunakan belanja tak terduga sebesar Rp400.000.000,00. Pada tahun 2018 belanja subsidi di anggarakan sebesar Rp2.500.000.000,00, namun tidak direalisasikan.

5) Belanja Hibah	2018	2017
	Rp36.888.690.030,00	Rp36.616.174.524,00

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Belanja Hibah dibagi menjadi hibah berupa uang dan hibah barang dan jasa. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah. Hibah berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Khusus realisasi hibah barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Permendagri 39 Tahun 2012.

Pada Tahun Anggaran 2018 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp50.105.197.600,00 dan terealisasi sebesar Rp36.888.690.030,00 atau mencapai 73,62% dari anggaran. Rincian realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	31.087.397.600,00	23.498.265.030,00	75,59	27.062.824.524,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.245.000.000,00	2.860.000.000,00	88,14	4.287.300.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.410.500.000,00	6.841.300.000,00	81,34	5.266.050.000,00
4	Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.362.300.000,00	3.689.125.000,00		
	Jumlah	50.105.197.600,00	36.888.690.030,00	73,62	36.616.174.524,00

6) Belanja Bantuan Sosial	2018	2017
	Rp18.000.000,00	Rp22.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada pihak lain. Pada Tahun Anggaran 2018 belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp128.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.000.000,00 atau mencapai 14,06% dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.22 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	467.000.000,00	315.241.590,00	67,50	1.297.547.150,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	10.308.544.900,00	8.158.587.120,00	79,14	12.946.763.200,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00		528.400.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Bermesin	223.000.000,00	207.560.000,00	93,08	233.509.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	73.500.000,00	73.275.000,00	99,69	307.012.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor	800.704.300,00	749.484.300,00	93,60	761.257.990,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	450.891.500,00	363.857.900,00	80,70	1.829.777.575,00
8	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.881.958.247,00	4.456.940.551,00	91,29	4.771.762.167,00
9	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.560.940.000,00	2.325.712.845,00	90,81	3.290.834.061,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	466.976.500,00	385.217.700,00	82,49	938.908.883,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.182.500.000,00	375.408.000,00	31,75	388.662.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	7.664.657.000,00	6.654.431.417,57	86,82	2.569.438.232,85
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	509.625.000,00	194.363.292,00	38,14	18.759.879.299,00
14	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	98.700.000,00	82.402.500,00		
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah				17.600.000,00
16	Belanja Modal DAK Pendidikan	280.000.000,00	264.705.000,00		
17	Belanja Modal Dana BOS	8.174.280.000,00	7.091.535.525,00		
	Jumlah	38.143.277.447,00	31.698.722.740,57	83,10	48.641.351.557,85

3) Belanja Modal	2018	2017
Gedung dan Bangunan	Rp50.204.937.760,00	Rp64.228.822.801,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupa konstruksi gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp50.204.937.760,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.23 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	65.196.833.700,00	49.906.587.760,00	76,55	64.228.822.801,00
2	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	312.000.000,00	298.350.000,00	95,63	
3	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan	1.500.000,00	0,00	0,00	
Jumlah		65.510.333.700,00	50.204.937.760,00	76,64	64.228.822.801,00

4) Belanja Modal	2018	2017
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp158.550.265.589,25	Rp191.553.232.458,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupa konstruksi jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp158.550.265.589,25 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.24 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	196.046.359.582,00	144.657.926.064,25	73,79	170.856.090.322,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	124.724.650,00	124.724.650,00	100,00	1.433.541.350,00
3	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Irigasi	13.392.994.139,00	10.471.879.875,00	78,19	17.921.497.686,00
4	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	5.860.930.000,00	3.295.735.000,00	56,23	1.342.103.100,00
Jumlah		215.425.008.371,00	158.550.265.589,25	73,60	191.553.232.458,00

5) Belanja Modal	2018	2017
Aset Tetap Lainnya	Rp8.700.917.452,00	Rp8.997.070.079,46

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam periode Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp8.700.917.452,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	1.975.700.000,00	1.580.796.295,00	80,01	1.038.045.993,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-barang Perpustakaan	0,00	0,00		24.700.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	49.000.000,00
4	Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00		6.086.652.360,00



No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
5	Belanja Modal untuk BLUD RSUD Lakipadada	7.795.350.000,00	7.109.571.157,00	91,20	1.798.671.726,46
6	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	
7	Belanja modal Pengadaan Tanaman	6.550.000,00	3.000.000,00	45,80	
	Jumlah	9.785.200.000,00	8.700.917.452,00	88,92	8.997.070.079,46

c. Belanja Tidak Terduga	2018	2017
	Rp1.302.937.111,65	Rp50.000.000,00

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Dalam periode Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.503.191.643,00 dan terealisasi sebesar Rp1.302.937.111,65 atau 86,68%. Terdapat kenaikan realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.252.937.111,65 dari tahun 2017.

3. Transfer	2018	2017
	Rp161.236.441.354,00	Rp149.747.799.526,97

Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp161.236.441.354,00 atau sebesar 99,54%. Belanja transfer tahun 2018 terdiri dari:

Tabel 5.26 Rincian Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	1.007.500.000,00	264.588.474,00	26,26	683.485.982,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	160.334.659.000,00	160.334.560.000,00	100,00	148.427.020.664,97
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	637.292.880,00	637.292.880,00	100,00	637.292.880,00
	Jumlah	161.979.451.880,00	161.236.441.354,00	99,54	149.747.799.526,97

a. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	2018	2017
	Rp264.588.474,00	Rp683.485.982,00

Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi merupakan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Lembang di lingkup Kabupaten Tana Toraja. Pada Tahun Anggaran 2018 belanja bagi hasil pajak dan retribusi dianggarkan sebesar Rp1.007.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp264.588.474,00 atau 26,26% dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.27 Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	300.000.000,00	107.889.974,00	35,96	193.618.832,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	707.500.000,00	156.698.500,00	22,15	489.867.150,00
Jumlah		1.007.500.000,00	264.588.474,00	26,26	683.485.982,00

b. Transfer Bantuan Keuangan	2018	2017
	<u>Rp160.334.560.000,00</u>	<u>Rp148.427.020.664,97</u>

Transfer Bantuan Keuangan merupakan transfer bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya. Transfer bantuan keuangan ke desa dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada 112 (seratus dua belas) Pemerintahan Lembang di lingkup Kabupaten Tana Toraja yang dianggarkan sebesar Rp160.334.659.000,00 dan terealisasi sebesar Rp160.334.560.000,00 atau 100,00%.

Pada Tahun Anggaran 2018 transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp160.334.659.000,00 dan terealisasi sebesar Rp160.334.659.000,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.28 Rincian Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	56.820.391.000,00	56.820.292.000,00	100,00	58.027.402.947,97
2	Belanja Dana Desa	103.514.268.000,00	103.514.268.000,00	100,00	90.399.617.717,00
Jumlah		160.334.659.000,00	160.334.560.000,00	100,00	148.427.020.664,97

c. Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2018	2017
	<u>Rp637.292.880,00</u>	<u>Rp637.292.880,00</u>

Kabupaten Tana Toraja menyajikan Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp637.292.880,00 dan sebesar Rp637.292.880,00. Transfer bantuan kepada partai politik dilakukan kepada delapan partai politik. Jumlah realisasi tahun 2017 dan 2018 tidak berubah.

4. Pembiayaan	2018	2017
	<u>Rp68.212.138.814,76</u>	<u>Rp125.554.148.743,09</u>

Pembiayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp68.212.138.815,00 dan terealisasi sebesar Rp68.212.138.814,76 atau mencapai 100,00% dari anggaran. Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan sebagai berikut :



Tabel 5.29 Rincian Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Pembiayaan	73.212.138.815,00	73.212.138.814,76	100,00	128.840.344.513,09
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.286.195.770,00
Jumlah Pembiayaan Netto		68.212.138.815,00	68.212.138.814,76	100,00	125.554.148.743,09

a. Penerimaan Pembiayaan	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp73.212.138.814,76	Rp128.840.344.513,09

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp73.212.138.815,00 dan terealisasi sebesar Rp73.212.138.814,76 atau mencapai 100,00%. Dengan rincian penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.30 Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	73.212.138.815,00	73.212.138.814,76	100,00	128.838.740.750,09
Jumlah		73.212.138.815,00	73.212.138.814,76	100,00	128.838.740.750,09

b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp5.000.000.000,00	Rp3.286.195.770,00

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau mencapai 100,00% dengan rincian penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5.31 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018		%	Tahun 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
2	Pembayaran utang jangka panjang lainnya	0,00	0,00		3.286.195.770,00
Jumlah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.286.195.770,00

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 digunakan untuk menambah penyertaan modal pada Bank BPD Sulselbar. Komposisi penyertaan modal pada Bank BPD Sulselbar pada tahun 2017 sebesar 1,88%.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp16.420.167.252,06	Rp73.212.138.814,76

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp16.420.167.252,06 sebagai berikut :



Tabel 5.32 Rincian Komponen SILPA

(dalam rupiah)

No.	Komponen SILPA	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	4.429.928.221,84
2	Kas di Bendahara Penerimaan	530.042.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	677.696.776,00
4	Kas di Bendahara JKN (Dana Kapitasi)	836.169.516,00
5	Kas di Bendahara Dana Bos	697.154.073,00
6	Kas di BLUD	9.439.587.895,22
Total SILPA		16.610.578.482,06

Total Silpa kas berbeda dengan Silpa di LRA, karena kas di bendahara pengeluaran termasuk dengan PFK yang belum disetor. PFK yang masih di pegang oleh bendahara pengeluaran pada 31 Desember 2018 tidak di catat sebagai pendapatan sebesar Rp190.411.230,00.

5.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp73.212.138.814,76 dan Rp128.838.740.750,09.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp73.212.138.814,76.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.836.617.234,36.

4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar Rp16.420.167.252,06. Terdapat koreksi kurang atas SilPA Tahun 2017 pada kas bendahara penerimaan sebesar Rp16.449.982,30 sebelum laporan keuangan diserahkan dan terdapat pengurangan kas sebesar Rp400.000.000,00 karena adanya pemindahan kas di bendahara pengeluaran ke aset lainnya.

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Posisi Aset per 31 Desember 2018 adalah Aset sebesar Rp1.835.800.337.166,23 Kewajiban sebesar Rp49.247.817.194,30 dan Ekuitas sebesar Rp1.786.552.519.971,93.

Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :



a) Kas di Kas Daerah	2018 <u>Rp4.429.928.221,84</u>	2017 <u>Rp48.023.871.675,46</u>
-----------------------------	--	---

Merupakan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.429.928.221,84 dan Rp48.023.871.675,46 yang berada di rekening Kas Daerah pada rincian sebagai berikut :

Tabel 5.37 Rincian Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Peruntukan Rekening	Tahun 2018	Tahun 2017
I	Bank Sulselbar Cabang Makale				
1)	Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tana Toraja	0110-001-000004302-1	DAU, DAK, Dana Bagi Hasil	480.032.708,33	19.766.966.835,10
2)	Rekening Kas Daerah Tk.II Tana Toraja	0110-001-000001581-8	PAD	216.948.414,00	1.212.204.348,00
3)	Rekening Dana Transfer Pusat dan Propinsi	0110-001-0000015851-1	Transfer Pusat/ Bantuan Provinsi	3.717.871.175,52	23.489.778.767,09
II	Bank BRI Cabang Makale				
1)	Kas Daerah Kabupaten Tana Toraja	0232-01-000038-30-3	Penerimaan PBB, Jasa Giro/ Deposito	413.250,00	165.544.583,92
III	Bank BNI Cabang Pembantu Makale				
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	0258359410	Jasa Giro/ Bunga Deposito	14.547.184,00	3.169.534.881,00
IV	Bank Mandiri Cabang Pembantu Tana Toraja				
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	152-00-1051861-7	Jasa Giro/ Bunga Deposito	115.489,99	219.842.260,35
Jumlah Kas Daerah				4.429.928.221,84	48.023.871.675,46

b) Kas di Bendahara Penerimaan	2018 <u>Rp530.042.000,00</u>	2017 <u>Rp416.910.469,30</u>
---------------------------------------	--	--

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa pungutan pendapatan daerah yang masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp530.042.000,00.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp525.493.000,00 dan Kas di Dinas Pariwisata sebesar Rp4.549.000,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut :

Tabel 5.38 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Nama O P D	Tahun 2018	Tahun 2017
A	Kas di Bendahara Penerimaan:		
1	Dinas Kesehatan		1.153.687,00
2	RSUD LakiPadada		16.449.982,30
3	Badan Pendapatan Daerah	525.493.000,00	
	a. Pajak Rumah Makan :		
	- UPTD Wilayah Mengkendek	460.000,00	
	- UPTD Wilayah Saluputti	145.000,00	
	- Wilayah Makale	140.000,00	
	- Kuliner Malam	13.655.000,00	
	b. Pajak Tambang dengan Karcis	288.000,00	
	c. Retribusi Pasar :		
	- UPTD Mengkendek	2.530.000,00	6.106.000,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama O P D	Tahun 2018	Tahun 2017
	- UPTD Saluputti		813.000,00
	- UPTD Makale		2.161.000,00
	d. Retribusi Pasar Hewan :		
	- Pasar Hewan Makale	100.000,00	660.000,00
	e. Retribusi Potong Hewan (RPH) :		
	- Kecamatan Mappak	15.750.000,00	1.200.000,00
	- Kecamatan Malimbong Balepe	38.100.000,00	17.280.000,00
	- Kecamatan Makale Selatan	74.580.000,00	6.960.000,00
	- Kecamatan Kurra	20.970.000,00	7.335.000,00
	- Kecamatan Sangalla Selatan		3.675.000,00
	- Kecamatan Sangalla Utara	115.890.000,00	64.215.000,00
	- Kecamatan Bittuang	1.830.000,00	5.850.000,00
	- Kecamatan Rano		330.000,00
	- Kecamatan Rembon	360.000,00	22.095.000,00
	- Kecamatan Bonggakaradeng	52.665.000,00	25.345.000,00
	- Kecamatan Makale	32.940.000,00	11.295.000,00
	- Kecamatan Rantetayo	9.495.000,00	3.690.000,00
	- Kecamatan Saluputti	14.205.000,00	150.000,00
	- Kecamatan Mengkendek	105.210.000,00	26.655.000,00
	- Kecamatan Masanda		510.000,00
	- Kecamatan Gandang Batu Sillanan	3.415.000,00	6.240.000,00
	- Kecamatan Makale Utara	75.000,00	
	- Kecamatan Simbuang	22.425.000,00	
	d. Retribusi MCK Pasar Ge'tengan	265.000,00	272.000,00
4	Dinas Pariwisata	4.549.000,00	
	- Retribusi Obyek Wisata Tilangnga'		4.185.000,00
	- Retribusi Obyek Wisata Pango-Pango		33.490.000,00
	- Retribusi Obyek Wisata Lemo		11.200.000,00
	- Retribusi Obyek Wisata Kambira		2.108.800,00
	- Retribusi Obyek Wisata Suaya	3.045.000,00	1.680.000,00
	- Retribusi Obyek Wisata Burake		133.806.000,00
	- Retribusi Obyek Wisata Tampang Allo	1.504.000,00	
	Jumlah	530.042.000,00	416.910.469,30

Tabel 5.39. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

No	Nama O P D	Jumlah Karcis	Nilai Satuan	Jumlah Saldo Kas
1	UPTD Wilayah Makale :			
	- Retribusi Pasar Hewan	20	5.000,00	100.000,00
2	UPTD Wilayah Mengkendek :			
	- Retribusi Pasar	1.265	2.000,00	2.530.000,00
	- Pajak Rumah Makan	230	2.000,00	460.000,00
	- Retribusi MCK	265	1.000,00	265.000,00
3	UPTD Wilayah Saluputti :			
	- Pajak Rumah Makan	29	5.000,00	145.000,00
4	Rumah Makan Wilayah Makale	22	5.000,00	110.000,00
		2	15.000,00	30.000,00
5	Rumah Makan Kuliner Malam	1.659	5.000,00	8.295.000,00
		536	10.000,00	5.360.000,00
6	Pajak Tambang dengan Karcis	16	18.000,00	288.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan :			
	- Kecamatan Makale :			
	Kerbau	27	150.000,00	4.050.000,00
	Babi	334	75.000,00	25.050.000,00
	P/A	128	30.000,00	3.840.000,00
	- Kecamatan Makale Selatan :			
	Kerbau	99	150.000,00	14.850.000,00
	Babi	618	75.000,00	46.350.000,00
	P/A	446	30.000,00	13.380.000,00
	- Kecamatan Makale Utara :			
	Babi	1	75.000,00	75.000,00
	- Kecamatan Sangalla Utara :			
	Kerbau	37	150.000,00	5.550.000,00
	Babi	1.236	75.000,00	92.700.000,00
	P/A	588	30.000,00	17.640.000,00
	- Kecamatan Mengkendek :			
	Kerbau	67	150.000,00	10.050.000,00
	Babi	1.044	75.000,00	78.300.000,00
	P/A	562	30.000,00	16.860.000,00
	- Kecamatan Gandang Batu Sillanan :			
	Babi	33	75.000,00	2.475.000,00
	P/A	28	30.000,00	840.000,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama O P D	Jumlah Karcis	Nilai Satuan	Jumlah Saldo Kas
	Sapi	1	100.000,00	100.000,00
	- Kecamatan Rantetayo :			
	Kerbau	22	150.000,00	3.300.000,00
	Babi	73	75.000,00	5.475.000,00
	P/A	24	30.000,00	720.000,00
	- Kecamatan Rembon :			
	P/A	12	30.000,00	360.000,00
	- Kecamatan Saluputti :			
	Kerbau	26	150.000,00	3.900.000,00
	Babi	101	75.000,00	7.575.000,00
	P/A	91	30.000,00	2.730.000,00
	- Kecamatan Bittuang :			
	Kerbau	3	150.000,00	450.000,00
	Babi	18	75.000,00	1.350.000,00
	P/A	1	30.000,00	30.000,00
	- Kecamatan Kurra :			
	Kerbau	55	150.000,00	8.250.000,00
	Babi	154	75.000,00	11.550.000,00
	P/A	39	30.000,00	1.170.000,00
	- Kecamatan Bonggakaradeng :			
	Kerbau	33	150.000,00	4.950.000,00
	Babi	407	75.000,00	30.525.000,00
	P/A	573	30.000,00	17.190.000,00
	- Kecamatan Malimbong Balepe :			
	Kerbau	58	150.000,00	8.700.000,00
	Babi	266	75.000,00	19.950.000,00
	P/A	315	30.000,00	9.450.000,00
	- Kecamatan Simbuang :			
	Kerbau	18	150.000,00	2.700.000,00
	Babi	263	75.000,00	19.725.000,00
	- Kecamatan Mappak :			
	Kerbau	5	150.000,00	750.000,00
	Babi	200	75.000,00	15.000.000,00
	Jumlah			525.493.000,00

Atas saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp530.042.000,00 telah disetor ke kas daerah pada tahun 2019 sebesar Rp470.693.412,00.

c) Kas di	2018	2017
Bendahara	Rp677.696.776,00	Rp3.620.695.240,00
Pengeluaran		

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp677.696.776,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.620.695.240,00 merupakan saldo uang persediaan yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

Tabel 5.40 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Nama O P D	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Dinas Pendidikan	58.487.392,00	1.460.244.470,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	400.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	200.000.000,00	
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000,00	360.000,00
5	Badan Lingkungan Hidup Daerah		50,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Datu Pintu	17.076.342,00	
7	Dinas Sosial		589.800,00
8	Dinas Kepemudaan Olah Raga		4.000,00
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		2.500.000,00
10	Sekretariat Daerah	149.190.612,00	389.298.392,00
11	Kecamatan Sangalla Utara	0,00	69.782.557,00
12	Kecamatan Mengkendek	66.000,00	720,00
13	Kecamatan Gandang Batu Sillanan	500,00	46.800.000,00
14	Kecamatan Saluputti		59.750.000,00
15	Kecamatan Rantetayo		1.349.750,00
16	Kecamatan Kurra	5.421.000,00	36.500.000,00



No	Nama O P D	Tahun 2018	Tahun 2017
17	Kecamatan Bonggakaradeng		20.290.000,00
18	Kecamatan Masanda	830.000,00	4.400.000,00
19	Kecamatan Mappak	0,00	73.583.000,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.913.700,00	
21	PPKD		1,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		1.055.242.500,00
23	Pajak Pusat yang belum disetorkan	190.411.230,00	
Total		677.696.776,00	3.620.695.240,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke Kasda per 26 Februari 2019 sebesar 239.547.004,00 masih terdapat sisa yang belum disetorkan sebesar Rp448.086.292,00 terdiri dari ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp48.086.292,00; Ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp400.000.000,00. Ketekoran kas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp400.000.000,00 telah di pindahkan ke aset lainnya pada tagihan tuntutan ganti kerugian daerah. Selain itu terdapat penambahan atas pengembalian belanja tak terduga tahun 2018 yang dikembalikan di tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 pada Dinas PU.

Pada 31 Desember 2018 terdapat sisa saldo di bendahara gaji Dinas Pendidikan sebesar Rp1.430.388.366,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Kas di Bendahara Gaji

(dalam rupiah)

No	Uraian	Sisa Saldo Kas 31 Desember 2018
1	Gaji Bp. Marten Tidak Dibayarkan	7.143.200,00
2	RTGS ke Rekening BRI-Pembayaran Sertifikasi Guru Tahap III & IV	772.158.585,00
3	Kekurangan Tunjangan Fungsional Oktober s.d November 2018	670.000,00
4	Pembayaran LS Tambahan Sertifikasi Guru SD	64.679.460,00
5	Pengembalian Belanja (SP2D 0788)	584.490.000,00
6	Kurang Setor PPh 21 Sertifikasi Guru TK	1.247.121,00
Total		1.430.388.366,00

d)	Kas di	2018	2017
	BLUD	Rp9.439.587.895,22	Rp17.268.962.208,00

Kas di BLUD sebesar Rp9.439.587.895,22 merupakan sisa kas pada RSUD Lakipadada Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

Tabel 5.42 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nomor Rekening	Jumlah
1	Setara Kas (Deposito)	110-0000008051	8.500.000.000,00
2	BPD (Giro)	110-002-000019544-9	178.065.213,00
3	BRI Bendahara Pengeluaran		110.737.925,40
4	BRI Bendahara Penerimaan	0000232-01-000729-30-2	568.924.749,61
5	BNI Penerimaan	278429249	1.500.685,00
6	BRI BNN	23201000730303	9.496.832,20
7	Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran		55.664.339,65
8	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan		15.198.090,16
Jumlah Sisa Kas Per 31 Desember 2018			9.439.587.895,22



e) Kas di	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bendahara	Rp836.169.516,00	Rp1.933.370.259,00
JKN		

Kas di Bendahara Kapitasi JKN adalah pos untuk menampung sisa dana kapitasi yang belum dibelanjakan oleh Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat saldo kas di Bendahara FKTP sebesar Rp836.169.516,00. Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN sebagai berikut :

Tabel 5.43 Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN

(dalam rupiah)

No.	Nama FKTP	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Puskesmas Bittuang	18.831.745,00	38.838.044,00
2	Puskesmas Buakayu	23.643.092,00	152.918.744,00
3	Puskesmas Buntu	43.373.839,00	67.230.189,00
4	Puskesmas Buntu Limbong	29.143.390,00	79.837.992,00
5	Puskesmas Ge'tengan	240.325,00	139.118.048,00
6	Puskesmas Kondoran	9.400.092,00	60.582.883,00
7	Puskesmas Kondodewata	48.855.047,00	34.465.053,00
8	Puskesmas Kurra	26.134.278,00	17.894.674,00
9	Puskesmas Lekke	20.104.496,00	95.903.576,00
10	Puskesmas Rembon	29.431.325,00	80.647.045,00
11	Puskesmas Ratte	170.417.797,00	172.960.222,00
12	Puskesmas Rantetayo	3.215.531,00	23.610.652,00
13	Puskesmas Rantealang	13.727.038,00	21.644.874,00
14	Puskesmas Rano	130.271.643,00	142.740.143,00
15	Puskesmas Madandan	97.258,00	36.723.547,00
16	Puskesmas Makale	65.846.847,00	429.222.698,00
17	Puskesmas Sandabilik	85.438.291,00	146.830.126,00
18	Puskesmas Tumbang Datu	7.078.259,00	3.883.903,00
19	Puskesmas Batusura'	79.417.319,00	123.041.135,00
20	Puskesmas Ulusalu	6.719.297,00	18.134.800,00
21	Puskesmas Makale Utara	24.782.607,00	47.141.911,00
Jumlah		836.169.516,00	1.933.370.259,00

f) Kas di	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bendahara	Rp697.154.073,00	Rp1.948.328.963,00
BOS		

Kas di Bendahara Dana BOS adalah pos untuk menampung sisa dana BOS pada masing-masing sekolah di Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat saldo kas di Bendahara BOS sebesar Rp697.154.073,00 yang terdiri dari sisa dana BOS pada SD dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Tana Toraja, rincian sebagai berikut :

Tabel 5.44 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	SD	628.920.137,00	1.544.154.149,00
2	SMP	68.233.936,00	367.052.976,00
Jumlah Dana BOS		697.154.073,00	1.911.207.125,00



Rincian Kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 3a dan 3b.

2) **Piutang** 2018
Rp43.886.638.743,84 2017
Rp20.185.547.085,65

Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp43.886.638.743,84 dan Rp20.185.547.085,65 yang terdiri dari :

Tabel 5.45 Rincian Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Piutang Pajak Daerah	340.770.495,38	394.470.145,22
2	Piutang Retribusi	98.287.397,30	135.727.003,50
3	Piutang Lain-lain	16.565.597.070,46	15.119.563.023,00
4	Beban Dibayar Dimuka	26.881.983.780,70	0,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah		4.535.786.913,93
Jumlah		43.886.638.743,84	20.185.547.085,65

a) **Piutang Pajak** 2018
Rp340.770.495,38 2017
Rp394.470.145,22

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat saldo piutang pajak sebesar Rp340.770.495,38 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46 Rincian Saldo Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Piutang Pajak Hotel	236.143.252,00	246.953.858,00
2	Piutang Pajak Restoran	147.647.638,00	132.109.869,00
3	Piutang Pajak Reklame	500,00	30.285.500,00
4	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.096.743.380,00	1.035.722.548,00
5	Penyisihan Piutang Pajak	(1.139.764.274,62)	(1.050.601.629,78)
Jumlah Piutang Pajak		340.770.495,38	394.470.145,22

Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 4**. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 diketahui bahwa untuk penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan ditetapkan oleh kepala daerah (*official assesment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. **Kualitas lancar, dengan kriteria:**
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. **Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:**
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



- c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3. **Kualitas Diragukan, dengan kriteria:**
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4. **Kualitas Macet, dengan kriteria:**
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Pengelompokan kualitas piutang ini digunakan untuk melakukan penyisihan piutang pajak.

b) Piutang Retribusi	2018	2017
	Rp98.287.397,30	Rp135.727.003,50

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp98.287.397,30 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Rincian Saldo Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		1.403.979.038,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	229.903.925,00	217.418.575,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110.355.000,00	108.275.000,00
4	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	170.705.000,00	170.705.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olah raga	36.753.452,00	36.753.452,00
6	Piutang Uang Kuliah Akper	239.250.000,00	239.250.000,00
7	Piutang Retribusi Jasa Umum	30.263.040,00	
8	Penyisihan Piutang Retribusi	(718.943.019,70)	(2.040.654.061,50)
Jumlah Piutang Retribusi		98.287.397,30	135.727.003,50

Rincian piutang retribusi daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Berdasarkan kebijakan akuntansi nomor 09 mengenai kualitas piutang diketahui bahwa pengelolaan kualitas bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Kualitas ini digunakan untuk menyusun penyisihan piutang retribusi pada Kabupaten Tana Toraja.

c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2018	2017
	Rp16.565.597.070,46	Rp15.119.563.023,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.565.597.070,46 yang terdiri dari :



Tabel 5.48 Rincian Saldo Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Piutang Dom Kendaraan Dinas Roda 2	990.500,00	990.500,00
2	Piutang TP/TGR	529.800.606,46	224.409.933,00
3	Piutang PPh 21	615.000,00	615.000,00
4	Piutang JKN Non Kapitasi (BPJS)		141.716.000,00
5	Piutang Dana Non Kapitasi	124.925.000,00	
6	Piutang Usaha BLUD	15.909.265.964,00	14.751.831.590,00
Jumlah Piutang Lainnya		16.565.597.070,46	15.119.563.023,00

(1) Piutang Dom	2018	2017
Kendaraan Dinas	Rp990.500,00	Rp990.500,00
Roda 2		

Piutang Dom Kendaraan Dinas Roda 2 sebesar Rp990.500,00 yaitu dom kendaraan dinas roda 2 yang di dom oleh Pegawai Pemerintah Daerah Tana Toraja (6 orang) dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.49 Rincian Saldo Piutang Dom Kendaraan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Nama Pembeli	Nomor Polisi	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Drs. M. Linggiallo	DD 2156 U	120.000,00	120.000,00
2	Drs. Slamet Darmanto	DD 2345 U	150.000,00	150.000,00
3	Enos Karaeng	DD 2149 U	220.000,00	220.000,00
4	F.S.S. Paresa	DD 2191 U	275.000,00	275.000,00
5	Piter Patabang	DD 4008 U	50.000,00	50.000,00
6	P. Tandi Mallisa	DD 2144 U	175.500,00	175.500,00
Jumlah			990.500,00	990.500,00

Rincian Dom kendaraan dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

(2) Piutang	2018	2017
TPTGR	Rp529.800.606,46	Rp224.409.933,00

Saldo Piutang TPTGR per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp529.800.606,46 dan Rp224.409.933,00. Rincian piutang TPTGR dapat dilihat pada **Lampiran 6**. Berdasarkan Daftar Hasil Sidang MPTPTGR Tahun 2018 terdapat Kerugian Daerah sebesar Rp1.032.548.717,63, sudah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp496.958.632,17 ke Kas Negara sebesar Rp80.888.525,00 (Pajak Tahun 2012 yang belum disetor oleh Bendahara Badan Kepegawaian Daerah), masih terdapat sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp454.701.560,46.

(3) Piutang PPh 21	2018	2017
	Rp615.000,00	Rp615.000,00

Piutang PPh 21 sebesar Rp615.000,00 yaitu piutang yang timbul karena Bendahara Pengeluaran Kecamatan Makale Utara salah menyeter Saldo Kas pada Kecamatan Makale Utara Tahun 2009 sebesar Rp615.000,00 (Saldo Kas Kecamatan Makale Utara disetor ke Kas Negara, seharusnya ke Kas Daerah). Rincian piutang PPh 21 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.



(4) Piutang Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)	2018	2017
	Rp124.925.000,00	Rp141.716.000,00

Piutang Pemakaian Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi (BPJS) per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp124.925.000,00 dan Rp141.716.000,00. Rincian piutang jaminan kesehatan nasional non kapitasi (BPJS) dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

(5) Piutang Usaha BLUD	2018	2017
	Rp15.909.265.964,00	Rp14.751.831.590,00

Piutang Usaha BLUD pada RSUD Laki pada per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp15.909.265.964,00 dan Rp14.751.831.590,00. Rincian piutang usaha BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 6**. Piutang Usaha BLUD ini merupakan piutang Pembayaran pengajuan klaim ke BPJS atas jasa yang telah di berikan RSUD Laki pada tahun 2018. Dengan rincian penambahan dan pengurangan piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Piutang BLUD

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2018
Piutang Usaha BLUD	14.751.831.590,00	15.909.265.964,00	14.751.831.590,00	15.909.265.964,00

(6) Beban Dibayar Dimuka	2018	2017
	Rp26.881.983.780,70	Rp0,00

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terdapat beban dibayar dimuka yang disajikan sebesar Rp26.881.983.780,70 karena adanya kelebihan pembayaran belanja modal. Dimana realisasi keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik. Sehingga saat realisasi fisik sama dengan realisasi keuangan, beban dibayar dimuka dapat dikurangkan.

d) Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	2018	2017
	Rp0,00	Rp4.535.786.913,93

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp4.535.786.913,93 sudah terealisasi di Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.51 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	737.003.331,00
2	Piutang Bea.Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	527.224.343,00
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan	0,00	751.048.336,00
4	Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	76.012.629,00
5	Piutang Pajak Rokok	0,00	2.467.291.174,00
6	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	-	(22.792.899,07)
Jumlah		0,00	4.535.786.913,93



3) Persediaan **2018**
Rp43.082.534.418,17 **2017**
Rp20.960.382.809,71

Persediaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp43.082.534.418,17 dan Rp20.960.382.809,71 yang terdiri atas :

Tabel 5.52 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Tahun 2018	Tahun 2017
	Persediaan Bahan Pakai Habis	827.439.340,00	1.012.119.100,00
1	Persediaan, Materai & Benda Pos Lainnya	1.824.000,00	1.500.000,00
2	Persediaan Alat Tulis Kantor	356.277.100,00	598.534.800,00
3	Persediaan Barang Cetak	469.338.240,00	412.084.300,00
	Persediaan Bahan/Material	7.900.350.198,17	7.933.668.909,71
1	Persediaan Bahan Baku Bangunan	18.046.375,00	0,00
2	Persediaan Obat-Obatan	6.564.377.565,35	7.929.146.534,71
3	Persediaan Pakan Ikan/Ternak		4.522.375,00
4	Persediaan Bahan Kimia	1.303.360.247,00	
5	Persediaan Bahan Makanan	14.566.010,82	
	Persediaan Barang Lainnya	34.354.744.880,00	12.014.594.800,00
1	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Masyarakat	34.317.564.880,00	11.958.643.800,00
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	5.001.500,00	376.000,00
3	Persediaan Hewan/ Ternak/Ikan		55.575.000,00
4	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	32.178.500,00	
	Jumlah Persediaan	43.082.534.418,17	20.960.382.809,71

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Metode penilaian persediaan menggunakan inventarisasi fisik (*Stock Opname*). Rincian persediaan per-OPD selengkapnya pada **Lampiran 7**.

Sistem pencatatan persediaan pada Kabupaten Tana Toraja menggunakan perpetual dan periodik. Metode perpetual digunakan untuk pencatatan persediaan obat dan barang yang akan diserahkan. Sedangkan metode periodik digunakan untuk mencatat persediaan barang habis pakai, bahan material kecuali obat dan Persediaan barang lainnya kecuali barang yang akan diberikan, kepada pihak ketiga.

b. Investasi Jangka Panjang **2018**
Rp34.220.778.563,00 **2017**
Rp27.807.244.562,00

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp34.220.778.563,00 dan Rp27.807.244.562,00 terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.53 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
I.	Investasi Non Permanen :	4.238.013.500,00	4.238.013.500,00
a)	Dana Bergulir	1.660.707.612,00	1.664.081.162,00
b)	Penyisihan Dana Bergulir	(1.660.707.612,00)	(1.664.081.162,00)
c)	Investasi Non Permanen Lainnya - Pinjaman Ternak	4.238.013.500,00	4.238.013.500,00
II.	Investasi Permanen :	29.982.765.063,00	23.569.231.062,00



No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
a)	Penyertaan Modal kepada PT BPD Sulsel	21.586.000.000,00	16.586.000.000,00
b)	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tana Toraja	8.396.765.063,00	6.983.231.062,00
	Jumlah	34.220.778.563,00	27.807.244.562,00

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen berupa pinjaman bantuan kepada kelompok ternak dana bergulir dan dana bergulir. Nilai investasi non permanen kepada kelompok ternak per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.238.013.500,00. Investasi non permanen dana bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.660.707.612,00 merupakan saldo dana bergulir yang berada di masyarakat. Pada Tahun 2017 seharusnya dana bergulir sebesar Rp1.664.256.612,00 (Rp1.664.081.162,00 + Rp175.450) karena adanya kelebihan setor pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.920 dan Dinas Pertanian sebesar Rp173.530 sehingga mengurangi pada jumlah dana bergulir dan diperoleh sebesar Rp1.664.081.162,00.

Investasi Non permanen Dana Bergulir tersebut telah disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dengan melakukan penyesuaian membentuk akun dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Dana Bergulir sebesar Rp1.660.707.612,00 merupakan dana bergulir pada delapan OPD dengan rincian umum jatuh tempo, aging schedule, serta *Net Realizable Value*. Pengurangan Dana Bergulir di tahun 2018 sebesar Rp3.549.000,00 dari penyeteroran Dinas Sosial sebesar Rp1.500.000,00 dan Dinas Koperasi sebesar Rp2.049.000,00. Rincian Investasi Non Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 8.a, 8.b.**

2) Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.982.765.063,00 merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada PT Bank Sulselbar dan PDAM Kabupaten Tana Toraja, dengan uraian sebagai berikut :

(a) Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2018 adalah Rp21.568.000.000,00

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak melakukan penambahan penyertaan modal ke Bank Sulselbar. Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.568.000.000,00.

Penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*) dengan persentase kepemilikan sebesar 2,25% sesuai dengan Laporan Auditor Independen Husni, Mucharam &



Rasidi Nomor 00026/2.0082/AU.1/07/0083-3/1/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019.

Investasi dicatat sebesar harga perolehannya dan deviden yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan deviden yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktivitas dan rentabilitas investasi.

(b) Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Tana Toraja disajikan sebesar Rp8.396.765.063,00

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 100%. Penilaian investasi permanen pada PDAM Kabupaten Tana Toraja menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yaitu sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 (*audited*) diketahui bahwa nilai ekuitas PDAM Tana Toraja per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.396.765.063,00 sesuai dengan Laporan Auditor Independen KAP Khairunnas Nomor 02/NAS-B/OK/III/19 tanggal 4 Maret 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Modal Pemda Kabupaten Tana Toraja	26.898.494.698,00
2	Penyertaan Pemda yang belum ditetapkan statusnya	(12.449.247.349,00)
3	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	10.572.675.395,00
4	Laba/rugi ditahan	(16.625.157.681,00)
	Jumlah	8.396.765.063,00

(c) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tana Toraja disajikan sebesar Rp0,00

Penyajian nilai tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 21/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penyesuaian Nilai Penyertaan Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Aset Perusahaan Daerah Kabupaten Tana Toraja, yang menetapkan perubahan metode penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari metode biaya ke metode ekuitas.

Penerapan nilai investasi pada Perusda dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp0,00 dengan pertimbangan bahwa Perusda mengalami kerugian terus menerus dan sudah tidak layak melakukan aktivitas operasional. Sampai dengan penyusunan laporan keuangan per 31 desember 2018 status Perusda mati suri, sambil menunggu Peraturan Bupati tentang pembubaran Perusahaan Daerah. Penetapan aset Perusda baik pemanfaatan dan penatausahaannya telah diserahkan kepada BPKAD sejak tahun 2014.

Rincian Investasi Permanen dapat dilihat pada Lampiran 9.



c. Aset Tetap	2018	2017
	Rp1.641.584.609.739,30	Rp1.544.191.777.746,85

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.641.584.609.739,30 dan Rp1.544.191.777.746,85. Rincian aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran 10**. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Tanah	233.024.599.685,00	221.593.611.979,00
2	Peralatan dan Mesin	335.146.697.853,80	307.074.779.236,09
3	Gedung dan Bangunan	527.168.172.075,07	473.883.896.113,50
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.283.579.042.781,18	1.142.456.620.846,86
5	Aset Tetap Lainnya	40.267.531.440,40	33.781.697.845,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	54.226.068.882,85	49.003.048.939,00
7	Akumulasi Penyusutan	(831.827.502.979,00)	(683.601.877.213,00)
Total		1.641.584.609.739,30	1.544.191.777.746,85

1) Tanah	2018	2017
	Rp233.024.599.685,00	Rp221.593.611.979,00

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp233.024.599.685,00 dan Rp221.593.611.979,00.

2) Peralatan Mesin	2018	2017
	Rp335.146.697.853,80	Rp307.074.779.236,09

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp335.146.697.853,80 dan Rp307.074.779.236,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2018
1	Alat-Alat Besar	9.298.067.274,00
2	Alat-Alat Angkutan	92.272.204.379,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.996.368.633,00
4	Alat Pertanian	1.893.043.520,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.165.975.466,45
6	Alat Studio dan Komunikasi	6.772.479.499,09
7	Alat-Alat Kedokteran	55.218.008.451,70
8	Alat Laboratorium	54.039.858.887,56
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.490.691.743,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		335.146.697.853,80

3) Gedung dan Bangunan	2018	2017
	Rp527.168.172.075,07	Rp473.883.896.113,50

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp527.168.172.075,07 dan Rp473.883.896.113,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Rincian Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2018
1	Bangunan dan Gedung	496.080.150.582,70
2	Monumen	31.088.021.492,37
Jumlah Gedung dan Bangunan		527.168.172.075,07



Saldo Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp831.827.502.979,00 dan Rp683.601.877.213,00. Pada tahun 2018 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp4.461.532.272,00, akibat penilaian kembali atas aset tetap. Sehingga akibat koreksi saldo awal tersebut terdapat selisih pada prosedur analitis sebesar Rp4.461.532.272,00.

8) Aset Lainnya	2018	2017
	Rp56.415.197.219,86	Rp59.713.556.386,00

Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp56.415.197.219,86 dan Rp59.713.556.386,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.60 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	400.000.000,00	480.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	252.407.500,00	252.407.500,00
3	Aset Tak Berwujud (Software)	2.336.213.993,00	1.439.390.993,00
4	Aset Lain-Lain	53.426.575.726,86	58.021.277.893,00
Jumlah		56.415.197.219,86	59.713.556.386,00

1) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	2018	2017
	Rp400.000.000,00	Rp480.000,00

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp400.000.000,00 dan Rp480.000,00 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang timbul dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang telah ditetapkan SKTJM. Piutang berkurang karena adanya penyetoran sebesar Rp480.000,00 oleh Dinas Perhubungan. Pada tahun 2018 terdapat perpindahan dari kas di bendahara pengeluarann ke tuntutan ganti rugi. Sebab, nilai sebesar Rp400.000.000,00 merupakan ketekoran kas pada Dinas Kesehatan yang belum ditetapkan pembebanannya oleh TPKD.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2018	2017
	Rp252.407.500,00	Rp252.407.500,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp252.407.500,00 merupakan perjanjian penyerahan/penggunaan tanah hak pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan PT Makassar Inti Permai, sesuai perjanjian (Amandemen) Nomor 130/1001/Hukum tanggal 19 Juli 1999, berupa pembangunan 109 buah ruko diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluas 7.344 m2 terletak di Pasar Bolu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.61 Rincian Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Saluran Drainase	61.700.000,00	61.700.000,00
2	Pelataran Keliling	76.182.500,00	76.182.500,00
3	Trotoar	16.900.000,00	16.900.000,00
4	Taman/Jalur Hijau	82.400.000,00	82.400.000,00
5	Pohon Pelindung	5.725.000,00	5.725.000,00
6	Lampu-lampu taman	9.500.000,00	9.500.000,00
Jumlah		252.407.500,00	252.407.500,00



Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset dari Kabupaten Tana Toraja ke Kabupaten Toraja Utara Nomor 35/III/2011/BPKAD tanggal 25 Maret 2011 telah diserahkan Tanah Pasar Bolu Rantepao dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, tetapi aset pendukung yang berada pada tanah tersebut masih disajikan sebagai aset kemitraan.

3) Aset Tidak Berwujud 2018 2017
Rp2.336.213.993,00 **Rp1.439.390.993,00**

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.336.213.993,00 dan Rp1.439.390.993,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.62 Rincian Aset Tak Berwujud (Software) (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Dinas Kesehatan	99.880.000,00	99.880.000,00
2	RSUD LakiPadada	388.800.000,00	193.000.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan	480.227.000,00	480.227.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	596.023.000,00	29.750.000,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	49.500.000,00	49.500.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	248.160.000,00	248.160.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	338.873.993,00	338.873.993,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	39.930.000,00	
9	Sekretariat Daerah	94.820.000,00	
Jumlah		2.336.213.993,00	1.439.390.993,00

4) Aset Lain-lain 2018 2017
Rp53.426.575.726,86 **Rp58.021.277.893,00**

Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 2018 dan 2017 sebesar Rp53.426.575.726,86 dan Rp58.021.277.893,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.63 Rincian Aset Lain-lain (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
I	Aset yang Rusak Berat :		
1	Peralatan dan Mesin	45.195.001.745,86	41.364.993.130,00
2	Gedung dan Bangunan	5.370.412.436,00	12.178.579.939,24
3	Jalan, Irigasi dan Jembatan	270.134.675,00	270.134.675,00
4	Aset Tetap Lainnya	2.765.712.949,00	2.765.712.949,00
	Jumlah aset yang rusak berat	53.426.575.726,86	56.579.420.693,24
II	Ekstra Kompatabel		1.382.669.695,76
Jumlah Aset Lain-lain		53.426.575.726,86	58.021.277.893,00

2. Kewajiban 2018 2017
Rp49.247.817.194,30 **Rp20.819.834.742,54**

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp49.247.817.194,30 dan Rp20.819.834.742,54 yang terdiri atas :



Tabel 5.64 Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Kewajiban Jangka Pendek	49.247.817.194,30	20.819.834.742,54
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		49.247.817.194,30	20.819.834.742,54

a. Kewajiban	2018	2017
Jangka Pendek	<u>Rp49.247.817.194,30</u>	<u>Rp20.819.834.742,54</u>

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp49.247.817.194,30 dan Rp20.819.834.742,54 yang terdiri atas :

Tabel 5.65 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	190.411.230,00	294.792.026,00
2	Utang Bunga	0,00	2.937.111,65
3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten / Kota	7.785.000,00	7.785.000,00
5	Utang Belanja (BLUD)	6.049.602.598,00	5.221.735.368,39
6	Utang Belanja Pegawai	17.754.000,00	0,00
7	Utang Kepada Pihak Ketiga	42.982.264.366,30	15.292.585.236,50
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		49.247.817.194,30	20.819.834.742,54

1) Utang	2018	2017
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>Rp190.411.230,00</u>	<u>Rp294.792.026,00</u>

Utang Pemotongan PPH/PPN Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merupakan utang pemerintah atas pemotongan PPh/PPN Pusat yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2018 sebesar Rp190.411.230,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.66 Rincian Utang PFK

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Dinas Pendidikan	1.446.544,00	73.744.629,00
2	RSUD Laki Padada		10.117.380,00
3	Dinas Sosial		164.544,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3,00	450.000,00
5	Sekretariat Daerah	55.649.628,00	107.931.248,00
6	Inspektorat Daerah		393.000,00
7	Kecamatan Makale Selatan	90.000,00	1.044.816,00
8	Kecamatan Sangalla Utara	13.786.043,00	
9	Kecamatan Saluputti	1.702.150,00	3.590.824,00
10	Kecamatan Kurra	2.421.260,00	
11	Kecamatan Bonggakaradeng	5.486.250,00	7.007.035,00
12	Kecamatan Rano		1.966.226,00
13	Kecamatan Masanda	539.851,00	3.975.000,00
14	Kecamatan Mappak	404.400,00	
15	Kelurahan Kondodewata		206.163,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	108.845.556,00	12.171.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39.545,00	72.030.161,00
Total		190.411.230,00	294.792.026,00



2) Utang Bunga	<u>2018</u> Rp0,00	<u>2017</u> Rp2.937.111,65
----------------	-----------------------	-------------------------------

Jumlah utang bunga Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah Pusat atas pinjaman SLA-1011/DP3/1197 tanggal 23 Desember 1997 per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.937.111,65 dan pada Tahun 2018 sudah dibayarkan menggunakan dana bantuan tak terduga.

3) Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	<u>2018</u> Rp7.785.000,00	<u>2017</u> Rp7.785.000,00
--	-------------------------------	-------------------------------

Jumlah Utang kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.785.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 11**. Bagian lancar utang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah utang jasa giro dan utang penerimaan BPHTB ke Kabupaten Toraja Utara.

4) Utang Belanja	<u>2018</u> Rp6.067.356.598,00	<u>2017</u> Rp5.221.735.368,39
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Utang Belanja Tahun 2017 sebesar Rp5.221.735.368,39 telah dibayar pada BLUD RSUD Lakipadada yaitu jasa obat dan medik umum sebesar Rp644.746.261,89; jasa obat dan medik Jampersal Rp11.647.530,00; jasa obat dan medik BPJS sebesar Rp4.565.341.576,50. Utang Belanja Tahun 2018 sebesar Rp6.049.602.598,00 merupakan biaya yang masih harus dibayar pada BLUD RSUD Lakipadada yaitu atas jasa obat dan medik umum sebesar Rp706.365.564,53; jasa obat dan medik Jampersal sebesar Rp29.322.810,00; dan jasa obat dan medik BPJS sebesar Rp5.313.914.223,25. Selain itu terdapat utang belanja pegawai sebesar Rp17.754.000,00 yang timbul karena adanya guru yang belum mendapatkan pembayaran tunjangan khusus untuk daerah terpencil. SK penetapan penerima tunjangan telah terbit di tahun 2018, namun guru yang bersangkutan belum menerima pembayaran. Sehingga dicatat sebagai hutang belanja pegawai agar di tahun berikutnya dapat terbayar. Hutang pegawai hanya pada satu orang guru.

5) Utang Kepada Pihak Ketiga	<u>2018</u> Rp42.982.264.366,30	<u>2017</u> Rp15.292.585.236,50
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp42.982.264.366,30 dan Rp15.292.585.236,50.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang kepada rekanan/pelaksana atas pekerjaan/kegiatan yang memiliki kemajuan fisik pekerjaan lebih besar dibandingkan nilai uang yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018.

Dari nilai utang tersebut, diantaranya sebesar Rp51.414.724,00 merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga pada BLUD RSUD Lakipadada yang terdiri dari utang telepon sebesar Rp991.124,00; utang listrik sebesar Rp22.764.100,00; utang air PDAM sebesar



Rp26.359.500,00; utang bahan bakar minyak sebesar Rp600.000,00; utang kepada rekanan sebesar Rp700.000,00.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 12.a, 12.b, 12.c dan 12.d.**

b. Kewajiban Jangka Panjang	2018	2017
	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang pada Kabupaten Tana Toraja.

3. Ekuitas	2018	2017
	Rp1.786.552.519.971,93	Rp1.725.545.604.688,43

Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp1.786.552.519.971,93 dan Rp1.725.545.604.688,43.

5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1. Pendapatan – LO	2018	2017
	Rp964.447.554.393,20	Rp1.081.846.538.259,93

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp964.447.554.393,20 dan Rp1.081.846.538.259,93. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.67 Rincian Pendapatan LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
	KEGIATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN		
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
a)	Pendapatan Pajak Daerah	9.323.798.672,00	9.249.521.161,70
b)	Pendapatan Retribusi Daerah	10.380.841.764,80	7.602.410.234,00
c)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.084.937.047,00	5.782.413.940,16
d)	Lain-lain PAD yang Sah	81.759.410.648,40	101.755.864.522,07
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	107.548.988.132,20	124.390.209.857,93
2.	PENDAPATAN TRANSFER		
a.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1)	Dana Bagi Hasil Pajak	9.493.885.897,00	13.245.367.156,00
2)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(Sumber Daya Alam)	4.407.101.559,00	3.623.881.247,00
3)	Dana Alokasi Umum	551.496.571.000,00	550.123.359.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus	128.965.821.928,00	163.447.984.653,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	694.363.380.384,00	730.440.592.056,00
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		
a)	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan		1.360.819.000,00
b)	Pendapatan Hibah	35.932.198.162,00	
c)	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	30.889.488.398,00	39.354.115.609,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
	Pemerintah Daerah Lainnya		
d)	Dana Penyesuaian	94.713.499.317,00	89.878.392.137,00
e)	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	6.595.605.600,00
f)	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa/Lembang	0,00	89.826.804.000,00
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah	162.535.185.877,00	227.015.736.346,00
	JUMLAH PENDAPATAN	964.447.554.393,20	1.081.846.538.259,93

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	2018	2017
	<u>Rp107.548.988.132,20</u>	<u>Rp124.390.209.857,93</u>

1) Pendapatan Pajak Daerah	2018	2017
	<u>Rp9.323.798.672,00</u>	<u>Rp9.249.521.161,70</u>

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 31 Desember 2018, saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp9.323.798.672,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.68 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	Pajak Hotel-LO	361.128.200,00	304.935.650,00
2	Pajak Restoran-LO	398.056.899,00	337.898.248,00
3	Pajak Hiburan-LO	2.300.000,00	638.000,00
4	Pajak Reklame-LO	541.038.907,00	231.065.200,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	4.457.315.091,00	3.912.200.431,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	918.370.215,00	1.578.304.188,70
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.087.965.758,00	2.061.890.176,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	557.623.602,00	822.589.268,00
	Jumlah	9.323.798.672,00	9.249.521.161,70

2) Pendapatan Retribusi Daerah	2018	2017
	<u>Rp10.380.841.764,80</u>	<u>Rp7.602.410.234,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Retribusi Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 31 Desember 2018. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp10.380.841.764,80 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.69 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	(123.064.408,20)	388.118.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan – LO	926.266.512,00	110.045.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	445.425.000,00	452.804.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	831.563.750,00	794.131.925,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	98.857.500,00	107.394.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	3.000.000,00	11.500.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang-LO	9.080.000,00	172.675,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.810.880,00	
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	549.755.000,00	232.764.000,00



No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
10	Retribusi Terminal – LO	354.250.000,00	352.360.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	213.000.000,00	152.800.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	2.625.660.000,00	2.668.050.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	3.517.737.800,00	1.631.605.878,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	686.435.231,00	518.009.200,00
15	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	450.000,00	450.000,00
16	Retribusi Izin Gangguan – LO	25.149.500,00	125.940.056,00
17	Retribusi Izin Trayek – LO	56.465.000,00	56.265.000,00
Jumlah		10.380.841.764,80	7.602.410.234,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2018	2017
	Rp6.084.937.047,00	Rp5.782.413.940,16

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp6.084.937.047,00 merupakan deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Bank Sulselbar berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa Nomor 3 tanggal 09 Pebruari 2018 dan Akta RUPS Tahunan Nomor 2 tanggal 09 Pebruari 2018.

4) Lain-Lain PAD yang Sah	2018	2017
	Rp81.759.410.648,40	Rp101.755.864.522,07

Lain-lain PAD yang Sah-LO sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp81.759.410.648,40 terdiri dari :

Tabel 5.70 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan-LO	82.270.000,00	244.816.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya – LO	46.240.000,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	3.515.351.212,94	3.503.555.105,26
4	Pendapatan Bunga – LO	2.047.767.183,00	4.471.713.797,45
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	5.416.213.968,87	2.601.272.889,73
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	59.583.491,50	647.663.912,35
7	Pendapatan Denda Pajak – LO	7.737.468,00	10.771.832,00
8	Pendapatan dari Pengembalian – LO	110.302.395,00	592.533.356,00
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO	57.292.000,00	33.492.000,00
10	Pendapatan BLUD-LO	49.689.856.220,09	40.769.093.064,86
11	Dana Kapitasi – LO	15.226.092.819,00	12.057.515.065,00
12	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		36.769.516.923,00
13	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	0,00	53.920.576,42
14	Pelayanan Kesehatan Gratis	5.500.703.890,00	0,00
Jumlah		81.759.410.648,40	101.755.864.522,07

b. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	2018	2017
	Rp694.363.380.384,00	Rp730.440.592.056,00

Pada tahun 2018 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp694.363.380.384,00. Pendapatan transfer dana perimbangan ini terdiri dari



pendapatan yang di transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer terdiri dari:

- 1) Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
- 2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
- 3) Dana Alokasi Umum
- 4) Dana Alokasi Khusus

1) Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat- LO	<u>2018</u> Rp9.493.885.897,00	<u>2017</u> Rp13.245.367.156,00
---	--	---

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp9.493.885.897,00 terdiri dari :

Tabel 5.71 Rincian Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	4.775.414.038,00	4.914.868.971,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	4.498.638.859,00	8.096.108.129,00
3	Bea/Cukai Hasil Tembakau	219.833.000,00	234.390.056,00
Jumlah		9.493.885.897,00	13.245.367.156,00

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO	<u>2018</u> Rp4.407.101.559,00	<u>2017</u> Rp3.623.881.247,00
---	--	--

Pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.407.101.559,00 dan Rp3.623.881.247,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.72 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Pusat-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan – LO	33.994.904,00	23.703.718,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	56.418.304,00	0,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	2.752.536.010,00	1.937.788.081,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	701.234.591,00	525.572.127,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	74.650,00	0,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	862.843.100,00	1.136.817.321,00
Jumlah		4.407.101.559,00	3.623.881.247,00

3) Dana Alokasi Umum	<u>2018</u> Rp551.496.571.000,00	<u>2017</u> Rp550.123.359.000,00
---------------------------------	--	--

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp551.496.571.000,00 dan Rp550.123.359.000,00 yang merupakan pendapatan Transfer-LO berupa DAU dari Pemerintah Pusat yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018.



4) Dana	2018	2017
Alokasi Khusus	Rp128.965.821.928,00	Rp163.447.984.653,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus-LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp128.965.821.928,00 dan Rp163.447.984.653,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.73 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	DAK Bidang Pendidikan – LO	12.913.247.550,00	11.537.000.000,00
2	DAK Bidang Kesehatan – LO	21.788.099.178,00	14.571.940.230,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi- LO	3.266.312.000,00	0,00
4	DAK Bidang Kelautan Dan Perikanan- LO	1.112.001.000,00	0,00
5	DAK Bidang Lingkungan Hidup – LO	1.058.350.000,00	0,00
6	DAK Bidang AFFIRMASI – LO	69.260.853.700,00	26.291.553.100,00
7	DAK Bidang Pertanian- LO	4.504.838.000,00	6.370.890.000,00
8	DAK Bidang Irigasi – LO	5.194.396.000,00	0,00
9	DAK Bidang Pariwisata	1.647.500.000,00	
10	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.703.023.000,00	
11	DAK Bidang Pasar	3.674.906.500,00	
12	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.842.295.000,00	
13	DAK Bidang Kedaulatan Pangan – LO		7.020.534.500,00
14	DAK Bidang Perdagangan – LO		2.835.316.000,00
15	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat – LO		0,00
16	DAK Bidang IPD – LO		94.820.750.823,00
17	DAK Bidang Sarana Prasarana Penunjang – LO		0,00
Jumlah		128.965.821.928,00	163.447.984.653,00

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2018	2017
	Rp94.713.499.317,00	Rp179.705.196.137,00

1) Dana Penyesuaian	2018	2017
	Rp94.713.499.317,00	Rp89.878.392.137,00

Jumlah Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp94.713.499.317,00 dan Rp89.878.392.137,00. Dana Penyesuaian merupakan realisasi atas dana yang dialokasikan kepada Kabupaten Tana Toraja dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang terdiri dari :

Tabel 5.74 Rincian Dana Penyesuaian - LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	Dana Penyesuaian Pendapatan Profesi Guru PNSD – LO	67.014.539.000,00	65.105.231.506,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LO	919.678.000,00	937.200.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD – LO	3.264.600.000,00	2.608.200.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan – LO	12.876.456.917,00	14.004.969.431,00
5	Bantuan Operasional KB – LO	4.085.945.000,00	760.860.000,00
6	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LO	1.096.000.400,00	1.084.460.000,00
7	Tunjangan Khusus Guru	5.456.280.000,00	5.377.471.200,00
JUMLAH		94.713.499.317,00	89.878.392.137,00



2) Dana Lembang	2018	2017
	Rp0,00	Rp89.826.804.000,00

Jumlah Dana Lembang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp89.826.804.000,00. Dana Lembang merupakan realisasi atas dana yang dialokasikan kepada Kabupaten Tana Toraja dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah terkait desa.

c. Transfer Pemerintah Provinsi	2018	2017
	Rp31.889.488.398,00	Rp45.949.721.209,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	2018	2017
	Rp30.889.488.398,00	Rp39.354.115.609,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Pemerintah Provinsi-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp30.889.488.398,00 dan Rp39.354.115.609,00 merupakan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	6.328.735.560,00	7.575.235.495,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	4.980.519.599,00	5.991.849.606,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	9.180.934.340,00	9.338.603.190,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	266.111.804,00	1.266.650.464,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	10.133.187.095,00	15.181.776.854,00
	JUMLAH	30.889.488.398,00	39.354.115.609,00

2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2018	2017
	Rp1.000.000.000,00	Rp6.595.605.600,00

Jumlah Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp6.595.605.600,00.

d. Pendapatan Lain-Lain yang Sah	2018	2017
	Rp35.932.198.162,00	Rp1.360.819.000,00

Pendapatan Hibah	2018	2017
	Rp35.932.198.162,00	Rp1.360.819.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp35.932.198.162,00 dan Rp1.360.819.000,00 yang merupakan realisasi Penerimaan Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat dengan rincian :



Tabel 5.76 Rincian Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat - LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2017
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	720.000.000,00	0,00
2	Hibah Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	35.212.198.162,00	0,00
3	Hibah Air Minum Perdesaan		1.360.819.000,00
	JUMLAH	35.932.198.162,00	1.360.819.000,00

2. BEBAN	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp891.740.537.656,74	Rp957.953.810.426,90

Pada tahun 2018 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan angka Beban pada laporan operasional sebesar Rp891.740.537.656,74 Dan Rp957.953.810.426,90.

a) Beban Pegawai	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp438.514.693.670,61	Rp408.923.750.811,39

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp438.514.693.670,61 dan Rp408.923.750.811,39. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5.77 Rincian Beban Pegawai - LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	291.296.829.555,00	281.156.939.843,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	86.739.775.147,00	86.338.442.170,00
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH- LO	2.861.700.000,00	2.692.008.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	164.817.149,00	300.000.000,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	222.415.914,00	299.664.314,00
6	Uang Lembur-LO	1.125.756.000,00	880.439.000,00
7	Honorarium PNS	23.531.831.500,00	21.429.605.155,00
8	Honorarium Non PNS	2.065.720.000,00	7.591.175.000,00
9	Belanja Pegawai BLUD	30.505.848.405,61	8.235.477.329,39
	Jumlah Beban Pegawai	438.514.693.670,61	408.923.750.811,39

b) Beban Persediaan	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp18.650.797.455,54	Rp17.502.454.703,56

Beban persediaan pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp18.650.797.455,54 dan Rp17.502.454.703,56. Beban persediaan diakui apabila persediaan telah digunakan. Pendekatan yang digunakan untuk persediaan pada Kabupaten Tana Toraja adalah pendekatan aset. Dimana seluruh persediaan yang dibeli diakui semua bebannya. Kemudian saat akhir tahun, dilakukan penilaian kembali atas persediaan. Apabila masih terdapat nilai persediaan, maka harus dilakukan pengurangan beban di akhir tahun.



No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.304.730.767,00	5.098.661.459,00
	Jumlah Pemeliharaan (C)	21.134.570.141,00	17.267.425.509,00
D	Beban Perjalanan Dinas		
1	Beban Perjalanan Dinas	39.088.649.852,00	33.547.798.375,00
2	Beban Perjalanan Dinas -Dana BOS		0,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas (D)	39.088.649.852,00	33.547.798.375,00
	Beban Barang dan Jasa(A+B+C+D)	221.579.223.435,05	260.197.945.390,39

d) Beban Bunga	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp0,00	Rp14.180.620,80

Beban Bunga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.180.620,80. Pada tahun 2018 tidak terdapat beban bunga, namun terdapat pembayaran bunga bank atas bunga tahun 2017. Pemabayaran tersebut menggunakan menggunakan dana tak terduga, sehingga tidak diakui sebagai pembayaran bunga.

e) Beban Subsidi	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp400.000.000,00	Rp3.124.000.000,00

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp400.000.000,00 dan Rp3.124.000.000,00. Beban subsidi pada tahun 2018 timbul, karena adanya pasar murah yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka menyambut Idul Fitri dan Natal.

f) Beban Hibah	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp10.283.286.000,00	Rp9.553.350.000,00

Beban Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.283.286.000,00 dan Rp9.553.350.000,00. Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

g) Beban Bantuan Sosial	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp18.000.000,00	Rp22.500.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp18.000.000,00 dan Rp22.500.000,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

h) Beban Penyusutan	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Rp143.764.258.077,00	Rp123.206.235.487,00

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp143.764.258.077,00 dan Rp123.206.235.487,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



i) Beban Penyisihan Piutang	2018	2017
	Rp808.105.664,54	Rp3.114.048.590,35

Beban Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Piutang untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp808.105.664,54 dan Rp3.114.048.590,35. Rincian Beban Piutang untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.80 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	89.162.644,84	1.050.601.629,78
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	718.943.019,70	2.040.654.061,50
3	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Provinsi		22.792.899,07
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		808.105.664,54	3.114.048.590,35

j) Beban Transfer	2018	2017
	Rp57.772.173.354,00	Rp149.747.799.526,97

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp57.772.173.354,00 dan Rp149.747.799.526,97 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.81 Rincian Beban Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	107.889.974,00	683.485.982,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	156.698.500,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Dana Lembang	0,00	90.399.617.717,00
4	Beban Transfer Bantuan Alokasi Dana Lembang	56.820.292.000,00	58.027.402.947,97
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	637.292.880,00	637.292.880,00
Total		57.722.173.354,00	149.747.799.526,97

k) Beban Lain-lain	2018	2017
	Rp0,00	Rp50.000.000,00

Jumlah Beban Tidak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp50.000.000,00. Beban tak terduga pada laporan operasional di reklas ke pos luar biasa. Sebab pada pos luar biasa mempunyai karakteristik yang sesuai dengan belanja tidak terduga.

3. Pos Luar Biasa	2018	2017
	Rp902.937.111,65	Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pada 31 Desember 2018 pos luar biasa disajikan sebesar Rp902.937.111,65. Angka yang disajikan pada pos luar biasa adalah angka reklas dari beban lain-lain yang merupakan realisasi belanja tak terduga pada pos laporan realisasi anggaran.

4. Surplus/Defisit LO

Pada tahun 2018 dan tahun 2017 surplus defisit LO disajikan sebesar Rp71.804.079.624,81 dan sebesar Rp273.640.527.360,00



Tabel 5.82 Rincian Surplus/Defisit

(dalam rupiah)

Surplus/Defisit	Tahun 2018	Tahun 2017
Surplus/Defisit Dari Operasi	71.804.079.624,81	273.640.527.360,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	712.804.079.624,81	273.640.527.360,00

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari	2018	2017
Aktivitas Operasi	Rp198.223.585.381,42	Rp267.740.725.167,98

Kas Bersih diperoleh dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp198.223.585.381,42 dan Rp267.740.725.167,98 yang terdiri dari :

Tabel 5.83 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Arus Masuk Kas	1.071.079.856.692,94	1.095.027.645.917,93
2	Arus Keluar Kas	872.856.271.311,52	827.286.920.749,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		198.223.585.381,42	267.740.725.167,98

a. Arus Masuk Kas	2018	2017
	Rp1.071.079.856.692,94	Rp1.095.027.645.917,93

Arus Masuk Kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.071.079.856.692,94 dan Rp1.095.027.645.917,93 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.84 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Penerimaan Pajak Daerah	9.288.335.677,00	9.211.461.706,70
2	Penerimaan Retribusi Daerah	10.418.281.371,00	8.141.327.492,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.084.937.047,00	5.782.413.940,16
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.316.888.523,94	117.283.038.096,07
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.274.052.897,00	13.245.367.156,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.407.101.559,00	3.623.881.247,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	551.496.571.000,00	550.123.359.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	128.965.821.928,00	163.447.984.653,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	94.713.499.317,00	89.878.392.137,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	35.667.901.211,00	36.507.191.890,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi	103.514.268.000,00	89.826.804.000,00
12	Penerimaan Hibah	35.932.198.162,00	1.360.819.000,00
13	Penerimaan Lainnya	1.000.000.000,00	6.595.605.600,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.071.079.856.692,94	1.095.027.645.917,93



Tabel 5.87 Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Perolehan Tanah	444.263.420,00	6.662.258.200,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	31.698.722.740,57	48.641.351.557,85
3	Perolehan Gedung & Bangunan	50.204.937.760,00	64.228.822.801,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi & Jaringan	158.550.265.589,25	191.553.232.458,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.700.917.452,00	8.997.070.079,46
Jumlah Arus Keluar Kas		249.599.106.961,82	320.082.735.096,31

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>2018</u> Rp(5.000.000.000,00)	<u>2017</u> Rp(3.286.195.770,00)
---	--	--

Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp(5.000.000.000,00) dan (Rp3.286.195.770,00) yang terdiri dari :

Tabel 5.88 Rincian Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	5.000.000.000,00	3.286.195.770,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(5.000.000.000,00)	(3.286.195.770,00)

a. Arus Kas Masuk	<u>2018</u> Rp0,00	<u>2017</u> Rp0,00
--------------------------	------------------------------	------------------------------

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dari aktivitas pendanaan Arus Kas Masuk yang diperoleh adalah sebesar Rp0,00. Sebab terdapat realisasi penerimaan atas dana bergulir, namun dicatat pada lain-lain PAD yang sah. Sehingga apabila diakui kembali sebagai penerimaan dana bergulir, maka akan tercatat dua kali.

b. Arus Keluar Kas	<u>2018</u> Rp5.000.000.000,00	<u>2017</u> Rp3.286.195.770,00
---------------------------	--	--

Arus Keluar Kas yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2018 dan 2017 untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rp3.286.195.770,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.89 Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	3.286.195.770,00
Jumlah		5.000.000.000,00	3.286.195.770,00



4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	2018	2017
	Rp173.961.247,70	Rp1.603.763,00

Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp173.961.247,70 dan Rp1.603.763,00. Aktivitas Transitoris/Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) dan Kas BLUD. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga terdiri dari penerimaan dan pembayaran atas Iuran Wajib Pegawai (IWP), Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum), Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa.

Tabel 5.90 Rincian Arus Kas untuk Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
I	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.185.439.356,00	67.022.864.411,38
	Penyesuaian saldo awal kas BLUD (kurang catat pada Tahun 2016)		1.603.763,00
	Penyesuaian saldo awal kas BLUD (lebih catat pada Tahun 2017)	(16.449.982,30)	
	Jumlah Arus Masuk Kas	60.168.989.373,70	67.024.468.174,38
II	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.995.028.126,00	67.022.864.411,38
	Jumlah Arus Keluar Kas	59.995.028.126,00	67.022.864.411,38
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	173.961.247,70	1.603.763,00

5. Saldo Akhir Kas	2018	2017
	Rp16.610.578.482,06	Rp73.212.138.814,76

Saldo Akhir merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas selama Tahun Anggaran 2018 ditambah dengan saldo awal kas di Kasda (Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2017) yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.91 Rincian Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode 2018

Uraian	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2017
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	(56.601.560.332,70)	(55.626.601.935,33)
Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	73.212.138.814,76	128.838.740.750,09
Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	16.610.578.482,06	73.212.138.814,76
Saldo Akhir Kas	16.610.578.482,06	73.212.138.814,76

Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp73.212.138.814,76 merupakan saldo awal kas sesuai Neraca Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari kas di Kas Daerah Rp48.023.871.675,46; kas di Bendahara Penerimaan Rp416.910.469,30 seharusnya Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp400.460.487,00 karena kas di Bendahara Penerimaan BLUD lebih catat sebesar Rp16.449.982,30; kas di Bendahara Pengeluaran Rp3.620.695.240,00; kas di BLUD Rp17.268.962.208,00; kas di Bendahara JKN Rp1.933.370.259,00 dan kas di Bendahara Dana BOS Rp1.948.328.963,00.



Sedangkan rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp16.610.578.482,06 terdiri dari :

1.	Kas di Kas Daerah	4.429.928.221,84
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	530.042.000,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	677.696.776,00
4.	Kas di Bendahara JKN	836.169.516,00
5.	Kas di Bendahara Dana BOS	697.154.073,00
6.	Kas di BLUD	9.439.587.895,22
	Jumlah	16.610.578.482,06

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.725.545.604.688,43 dan Rp 1.725.195.106.315,55.

2. Surplus /(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp71.804.079.624,81 dan Rp123.892.727.833,03. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya untuk tahun 2018 terdiri dari:

- Koreksi atas kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.959.700,00
- Koreksi atas kas di bendahara penerimaan sebesar (Rp16.449.982,30)
- Koreksi atas penyisihan piutang sebesar Rp2.063.446.960,57
- Koreksi atas pembayaran utang kepada bank sebesar Rp2.937.111,65
- Koreksi dana bergulir sebesar (Rp3.373.550,00)
- Koreksi penyisihan dana bergulir sebesar Rp3.373.550,00
- Koreksi pengurangan penyertaan modal Bank BPD sebesar (Rp16.586.000.000,00)
- Koreksi penambahan penyertaan modal Bank BPD sebesar Rp5.000.000.000,00
- Koreksi pengurangan penyertaan modal kepada PDAM sebesar (Rp6.983.231.062,00)
- Koreksi penambahan penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp8.396.765.063,00
- Penambahan Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp65.423.236.999,00
- Koreksi pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebesar (Rp49.003.048.939,00)
- Koreksi utang kepada pihak ketiga sebesar (Rp24.972.649.474,25)
- Koreksi Penambahan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar (Rp5.452.619.500,00)
- Koreksi atas ekuitas lainnya sebesar (Rp9.383.828.583,14)
- Koreksi saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp25.419.996,00
- Koreksi saldo awal gedung dan bangunan sebesar Rp977.548.201,76
- Koreksi tuntutan ganti kerugian daerah sebesar (Rp480.000,00)
- Koreksi saldo awal aset tak berwujud sebesar (Rp605.687.000,00)



- t. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sebesar (Rp4.461.532.272,00)
- u. Koreksi penambahan tanah sebesar Rp10.986.724.286,00
- v. Koreksi penambahan aset tak berwujud sebesar Rp536.523.000,00
- w. Koreksi atas kurang jalan, irigasi, jaringan sebesar (Rp20.000.000,00)
- x. Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar (Rp1.321.711.041,80)
- y. Koreksi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp852.357.000,00
- z. Koreksi Penambahan penyertaan modal kepada PT.BPD Sulsel sebesar Rp16.586.000.000,00

- aa. Penambahan Peralatan dan mesin sebesar Rp8.463.859.201,00
- bb. Pengurangan Peralatan dan mesin sebesar (Rp19.214.754.476,86)
- cc. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.076.017.256,81
- dd. Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp11.023.741.257,00)
- ee. Koreksi Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp11.899.845.531,00
- ff. Koreksi Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp29.606.039.185,93)
- gg. Koreksi kurang aset tak berwujud sebesar Rp113.630.000,00
- hh. Koreksi aktiva tetap lainnya sebesar Rp4.894.487.300,00
- ii. Koreksi atas Persediaan sebesar (Rp6.000.000,00)
- jj. Koreksi Persediaan sebesar Rp190.317,18
- kk. Koreksi Kurang Aset Lainnya sebesar (Rp241.609.000,00)
- ll. Koreksi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp12.091.036.599,70)
- mm. Koreksi tambah Koreksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp261.732.483,55
- nn. Koreksi penambahan utang kepada pihak ketiga sebesar (Rp4.061.263.607,55)
- oo. Koreksi tambah beban dibayar dimuka sebesar Rp26.881.983.780,70

4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.786.552.519.971,93 dan Rp1.725.545.604.688,43.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja

1. Pembentukan

Kabupaten Tana Toraja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

2. Letak Geografis

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Tana Toraja secara geografis terletak antara 2⁰-3⁰ Lintang Selatan dan 119⁰-120⁰ Bujur Timur yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu;
- Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat – Kabupaten Luwu

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 km². Iklim Kabupaten Tana Toraja tergolong iklim tropis basah temperatur suhu rata-rata berkisar antara 17,9⁰C – 30,5⁰ C dengan kelembaban udara antara 82-86%, curah hujan rata-rata sekitar 1500mm pertahun sampai lebih dari 3500 mm/tahun. Topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang di kelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya di atas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara <300 m - > 2500 m di atas permukaan laut.

3. Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Tana Toraja terbagi atas 19 Kecamatan. Sampai dengan saat ini terdapat 112 Lembang dan 47 Kelurahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2018 sebanyak 4.537 orang.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari:

- Bupati Tana Toraja : Ir. Nicodemus Biringkanae
- Wakil Bupati Tana Toraja : Victor Datuan Batara, SH
- Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja : Welem Sambolangi, SE
- Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tana Toraja : Leonardus Tallupadang, SE
- Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tana Toraja: Andareas Tadan, SE

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
Sekretaris Daerah : Dr. Ir. Samuel Tande Bura, MM



Sekretaris Daerah membawahi:

- Asisten Pemerintahan Umum : Marthen Bawan Sirenden, SH
 - Asisten Ekonomi Pembangunan : Ir. Bonifacius Paundanan, M.Si
 - Asisten Administrasi Umum : Nirus Nikolas S.P., S.Sos., M.Si
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Dinas/Badan/Kantor sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
 4. Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas)

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tana Toraja Ir. Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara,SH masa jabatan 2016-2021 merupakan periode pertama setelah menjadi pemenang dalam Pilkada Serentak Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2015, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 dan dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016.

C. Terkait Pengalihan Urusan Pemerintah Daerah Sebagai Berikut :

Berdasarkan dasar hukum pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi (P3D) Bidang Pendidikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah setelah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah, selain itu LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertekad untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk Tana Toraja lebih baik.

Makale, 31 Desember 2018

BUPATI TANA TORAJA

NICODEMUS BIRINGKANAE



*Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*
